

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KELURAHAN KABAYAN KECAMATAN PANDEGLANG
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

Rt. NINA MARYANA
NIM. 062436

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rt. NINA MARYANA**
NIM : 062436
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juli 1980
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila kemudian hari Skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiatif, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 20 April 2011

Rt. NINA MARYANA

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : **Rt. NINA MARYANA**
NIM : 062436
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DI KELURAHAN KABAYAN KECAMATAN
PANDEGLANG KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2010

Serang, 20 April 2011

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

RINA YULIANTI, S.Ip., M.Si
NIP. 197407052006042011

YENI WIDYASTUTI, S.Sos, M.Si
NIP. 197602102005012003

Mengetahui

Dekan FISIP

DR.HAHMAD SIHABUDIN, M.Si
NIP. 196507042005011002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Aku ingin menjadi Batu Karang
Yang tetap tegar dihantam gelombang
Aku akan menjadi pohon yang rindang
Yang selalu memberikan naungan
Aku Ibarat sungai yang jernih
Yang beriak memberi kehidupan
Aku adalah kecantikan dan keindahan
Yang selamanya akan memberi kekuatan
Dengan ilmu aku mengabdikan diri
Dengan ketegaran kuhadapi dunia
Dengan kecantikan kuhiasi jagat raya*

*Skripsi ini Kupersembahkan
Kepada Ayah Bunda Ku yang
menghadirkanku ke bumi
Bundaku yang tabah, dan Ayah
yang sedang terbaring di Rumah
sakit
Serta Suamiku Mas Sujud
Prastowo
Yang sangat aku cintai
Dan juga Buah Hatiku
Ayu Kumala Dewi*

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : **Rt. NINA MARYANA**
NIM : 062436
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DI KELURAHAN KABAYAN KECAMATAN
PANDEGLANG KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2010

Serang, 20 April 2011

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

RINA YULIANTI, S.Ip., M.Si
NIP. 197407052006042011

YENI WIDYASTUTI, S.Sos, M.Si
NIP. 197602102005012003

Mengetahui
Dekan FISIP

DR.HAHMAD SIHABUDIN, M.Si
NIP. 196507042005011002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : **Rt. NINA MARYANA**
NIM : 062436
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DI KELURAHAN KABAYAN KECAMATAN
PANDEGLANG KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2010

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 25 Bulan
April tahun 2011 dinyatakan LULUS.

Serang, 25 April 2011

Ketua Penguji

(DR. SUWAIB AMIRUDDIN, M.Si)
NIP. 19740501 200501 1 005

Anggota

(TITI STIAWATI, S.Sos.,M.Si)
NIP. 19701125 200501 2 001

(YENI WIDYASTUTI, S.Sos.,M.Si)
NIP. 19760210 200501 2 003

Mengetahui

Dekan FISIP UNTIRTA

Ketua Program Studi

DR.H.AHMAD SIHABUDIN,M.Si
NIP. 196507042005011002

KANDUNG SAPTO NUGROHO, S.Sos.,M.Si.
NIP. 197809182005011002

ABSTRAK

Rt. Nina Maryana. NIM, 062436. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010.

Beras Miskin (Raskin) adalah Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun pada saat implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan seperti apa yang diharapkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi tersebut. Yaitu faktor ekonomi masyarakat RTS-PM di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang masih rendah. Sistem kolektif yang belum maksimal, pembentukan tim yang belum berkompeten belum bekerja sesuai harapan, kesadaran RTS-PM untuk membayar Raskin masih rendah, biaya operasional Raskin belum maksimal, masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah. Sumber daya aparatur masih rendah, lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan pada tahun 2010. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi tersebut sehingga pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 terlambat. Penelitian ini didasarkan pada teori Merilee S Grindle, dimana menurut Grindle dalam teori Implementasinya bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi harus dilihat dari prosesnya, dimana teori ini akan melihat dan menelaah bagaimana Proses Implementasi Beras Miskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Camat Pandeglang Hj. Nuriah, M.Si., Staf Kesos Kecamatan Mohamad Hilala Rayendra, Lurah Kabayan Eman Santosa, SH, RW 07 Pasir Kalapa Cece Husaeni, RW 05 Cikaung Unaenah, RW 14 Mangkubimi Sudarma, RTS-PM RW 07 Cikaung Dedeh Nurhasanah, RTS-PM RW 05 Cikaung Uun Husniar dan RTS-PM RW 14 Mangkubumi Enah. Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Informan Penelitian Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Implementasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan, dan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan apa yang diharapkan.

Kata Kunci : Implementasi Program Beras Miskin

ABSTRACT

Rt. Nina Maryana. NIM. 062436. *Rice Program Implementation Poor (Raskin) in Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang 2010.*

Poor Rice (Raskin) is a government program to help the poor and food insecurity so that they get cheap rice for their household needs. But at the time of policy implementation can not be run like what was expected, because there are several factors that affect the implementation delays. RTS community economic factor in Sub-Prime Sub Pandeglang Kabayan Pandeglang still low. Collective system is expected, awareness of the RTS-PM to pay Raskin still low, weak in implementing control functions of the implementation of Raskin Kabayan Village area. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Village Kabayan Raskin in 2010. What are the factors supporting and inhibiting factors so that payment Raskin implementation in Sub District Kabayan Pandeglang Pandeglang late ini 2010. This research is based on the theory of Merilee S. Grindle, where according to Grindle in implementation theory that to measure the success of implementation must be seen from the process, where the theory will see and examine how the Implementation Process of Rice Poor in Sub District Pandeglang 2010.

The method used in this research is ualiatatif Approach Method. Research instrument is the researcher himself. Technique data collecting by observation, interview and documentation. Informen in this research is Camat Pandeglang Hj. Nuriah, M.Sc., District Social Welfare Staff Pandeglang Rayendra Hilal Mohamed, Eman Kabayan Lurah Santosa, SH, RW 07 Kp. Pasir Kalapa Cece Husaeni, Cikaung Unaenah RW 05, RW 14 Mangkubumi Sudarma, RTS-PM RW 07 Cikaung Dedeh Nurhasanah, RTS-PM RW 05 Cikaung Uun Usniar and RTS-PM RW 14 Mangkubumi Enah. The results in this study based on interviews with informants Raskin Research ini Sub District Kabayan Pandeglang Pandeglang implementation does not conform with the objectives, and has not been going well according to what is expected.

Keywords : *Poor Implementation Programme*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Tahun 2010". Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas ijin Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tanpa hambatan yang berarti. Penelitian mengenai Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan pembayaran Beras Raskin dari Kelurahan Kabayan kepada Perum Bulog Divisi Regional I Rangkas Bitung, karena keterlambatan pembayaran itu pendistribusian beras Raskin di Kelurahan Kabayan menjadi terhambat dan tidak lancar, akibatnya Rumah Tangga Miskin Kelurahan Kabayan tidak dapat melakukan pendistribusian sebelum tunggakan sebelumnya dilunasi.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang tahun 2010. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tersebut. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang yaitu Camat Pandeglang, Lurah Kabayan, Staf Pelaksana Kasi Kesos Kecamatan dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di Kelurahan Kabayan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah dibantu oleh berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc, selaku Rektor Untirta beserta jajarannya, saya percaya dalam pimpinan dan pengasuhan Bapak Untirta menjadi semakin maju dan lebih berkualitas, maju terus Pak masa depan Untirta ada dalam genggaman Bapak.
2. Bapak DR. Ahmad Sihabudin, M.Si, selaku Dekan Fisip yang selalu berjuang menjadikan Fisip lebih baik dan mencetak sarjana sosial yang berbobot tekun dan mandiri.
3. Bapak DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., selaku Pembantu Dekan I
4. Ibu Dra. Rahmi Winarsih, M.Si, selaku Pembantu Dekan II
5. Bapak Idi Dimiyati, S.Ikom., selaku Pembantu Dekan II
6. Ibu Rina Yulianti S.Ip, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan masukan kepada saya sebagai penulis.
7. Ibu Yeni Widyastuti S.Sos, M,Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan arahan yang positif kepada saya selaku penulis.
8. Ibu Hj. Nuriah M,Si selaku Camat Pandeglang yang selalu memberikan motivasi dan arahan-arahan serta selalu memberikan dispensasi waktu bagi penulis untuk kegiatan akademik.
9. Bapak H. Eman Santosa selaku Lurah Kabayan Kecamatan Pandeglang yang telah memberikan izin penelitian bagi penulis.
10. Kawan-kawan serta sahabatku tercinta yang selalu setia bersama-sama mencari sumber-sumber data sebagai bahan pustaka.
11. Suamiku tercinta Mas Sujud Prastowo dan Anaku tersayang Ayu Kumala Dewi yang telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang indah.
12. Kedua orangtuaku yang tercinta Bapak Tubagus Syahrul Diat dan Bunda Maryamah yang selalu memberikan doa restunya kepada penulis, kasih sayangnya telah memotivasi saya untuk menjadi manusia yang berhasil, dan bisa mengabdikan kepada masyarakat dan negara.

13. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

1. Bapak Muhammad Hilal Rayendra S.Ag
2. Siti Rositawati
3. Deseu
4. Sahabat-sahabatku tercinta di Kantor Kecamatan Pandeglang.

14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis pribadi.

Serang, 25 April 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II DESKRIPSI TEORI PENELITIAN	
A. Deskripsi Teori	16
1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2. Implementasi Kebijakan Publik	21
3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	25
4. Model-Model Implementasi Kebijakan	29
B. Kerangka Berpikir	35
C. Asumsi Dasar	38

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	39
	B. Instrumen Penelitian	40
	C. Informan Penelitian	44
	D. Teknik Analisis Data	45
	E. Pengujian Keabsahan Data	48
	F. Tempat dan Waktu Penelitian	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Deskripsi Objek Penelitian	51
	B. Deskripsi dan Analisis Data	62
	C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran-Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	110
	RIWAYAT HIDUP PENELITI	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir	37
Gambar 2	Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)	45
Gambar 3	Struktur Organisasi Kelurahan Kabayan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan	43
Tabel 2	Informan Penelitian	44
Tabel 3	Jadwal Penelitian	50
Tabel 4	Informan Penelitian	61
Tabel 5	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM) disamping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam

peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Raskin dapat dicapai melalui Koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
6. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang koordinasi penanggulangan Kemiskinan.
7. Intruksi Presiden No. 8 Tahun 2008, tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
8. Keputusan Menko Kesra No. 35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Terdapat beberapa unsur dalam Raskin, antara lain adalah Pedoman Pelaksanaan Program Raskin, Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi, Tim Raskin Divisi Regional (Divre), Satker Raskin, Tim Koordinasi Raskin

Kecamatan, Pelaksanaan Distribusi, Titik Distribusi, Rumah Tangga Miskin (RTM), Musyawarah Desa/Kelurahan, Beras Standar Kualitas Bulog, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Raskin.

Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas Raskin, hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima Raskin. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut dibawa ke musyawarah Desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang rangkap atau yang tidak sesuai, kemudian musyawarah Desa memilih dan menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai jumlah plafon yang disediakan. Pemilihan dapat menggunakan sistem ranking sehingga hanya mereka yang benar-benar paling miskin dan rawan pangan saja yang dipilih. Hasil musyawarah Desa perlu diketahui oleh seluruh masyarakat.

Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga miskin maksimum 20 kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1600/kg. Harga tersebut adalah harga di titik distribusi. Biaya dari titik distribusi ketempat masing-masing di tanggung oleh masing-masing penerima. Raskin dibagikan setiap bulan di titik distribusi, waktu pembagian setiap bulan sesuai jadwal yang disepakati. Titik distribusi yaitu lokasi yang disepakati yang diusahakan dekat dengan penerima. Lokasi tersebut adalah di Kelurahan atau di Balai Desa. Raskin dibagikan oleh petugas yang ditunjuk di titik distribusi yang bersangkutan.

Penanggungjawab pembagian Raskin di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa atau Lurah. Raskin berasal dari gudang Dolog/sub Dolog, beras tersebut diangkut dari gudang oleh Satgas Raskin ke setiap titik distribusi. Satgas Raskin terdiri dari petugas Dolog/sub Dolog/petugas Pemda atau yang ditunjuk.

Dalam penyaluran beras miskin sering ditemui kendala-kendala, kendalanya bisa dari masyarakat bahkan dari aparaturnya itu sendiri. Jika ditemui para pengelola Raskin tersebut tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya, dan uang Raskin tersebut tidak disetorkan kepada bulog hal ini sangat menghambat penyaluran Raskin bulan berikutnya dan yang menjadi korban adalah masyarakat.

Kelancaran penyaluran Raskin sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat dalam Raskin. Salah satu yang terpenting adalah kelancaran pembayaran. Keluarga penerima harus lancar membayar uang beras pada petugas di titik distribusi. Petugas titik distribusi harus lancar dan segera menyetor uang hasil penjualan beras Raskin ke Dolog/sub Dolog yang selanjutnya harus segera disetor ke pusat. Penundaan pembayaran hasil penjualan Raskin tidak dibenarkan, karena apabila ada ketidaklancaran dari salah satu titik distribusi tersebut akan menyebabkan keterlambatan penyaluran Raskin berikutnya, yang rugi adalah masyarakat. Pembayaran maupun kelengkapan administrasi Raskin harus menjadi prioritas utama sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas.

Beras miskin yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharusnya beras dengan kualitas baik. Tetapi yang selama ini terjadi RTS-PM tersebut kebanyakan menerima beras dengan kualitas yang rendah dan tidak layak dikonsumsi, beras yang diterima RTSPM berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Permasalahannya bukan hanya itu, seringkali terjadi masyarakat yang membeli beras miskin tersebut bukan berasal dari RTS-PM, tetapi masyarakat menengah dan yang mampu juga, karena orang yang benar-benar miskin mereka tetap tidak mampu untuk membeli Raskin meskipun harganya yang murah hanya Rp. 1600 per kilogram di titik distribusi. Apalagi jika beras miskin tersebut sudah didistribusikan ke masing-masing RT, harga Raskin tersebut menjadi Rp. 2000/kg setelah mendapat persetujuan dari RTS-PM karena diperhitungkan dengan ongkos transport angkut beras dari Kelurahan masing-masing RW atau RT, dan jumlah RTSPM dengan kuota beras harus seimbang, karena jika jumlah RTSPM lebih banyak dari Raskin yang didistribusikan maka akan banyak RTSPM yang tidak dapat menerima jatah Raskin, yang dirugikan adalah RTSPM dan akan menyebabkan cemburu sosial.

Pelaksanaan program Raskin tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang dikoordinasikan bersama tim koordinasi pelaksana Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang. Setelah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) ditetapkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan selaku tim koordinasi tim kecamatan menerima daftar Nama-nama RTSPM yang disebut DPM 1 (Daftar Penerima Manfaat 1) pada

saat penyaluran beras raskin kepada Bupati pandeglang melalui Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang melampirkan :

1. Permohonan Penyaluran Raskin yang telah diketahui oleh Camat Pandeglang, dilengkapi dengan pengajuan beras Raskin, surat pernyataan jaminan Kelurahan diatas materai 6000, alokasi Pagu tiap Rukun warga di kelurahan Kabayan, dan Berita Acara Serah Terima Acara (BAST)
2. Daftar Penerima Manfaat (DPM 1) dari masing-masing RW.

Setelah diajukan kepada Bupati Pandeglang melalui Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang, tim Raskin Kabupaten membuat pengajuan Raskin ke tingkat Provinsi Banten dengan melampirkan :

1. Surat Permintaan Alokasi (SPA) Kabupaten
2. Surat Jaminan
3. Kwitansi lunas pembayaran

Setelah jalur administrasi dilalui, tim koordinasi Raskin Kabupaten akan menerima kartu DPM 1 dan buku panduan (Juknis) Raskin dari tingkat tingkat pusat, kartu DPM 1 serta buku Juknis Raskin tersebut dibagikan keseluruhan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan oleh Kecamatan dibagikan kembali ke tingkat Kelurahan/Desa. Setelah kartu DPM 1 dan buku juknis raskin diterima Kecamatan, Raskin siap untuk didistribusikan ke tingkat Kelurahan, dan Kelurahan sebagai Pelaksana titik distribusi Tingkat Kelurahan membagikan beras Raskin tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), melalui RW dan RT, selanjutnya RW yang memungut pembayaran Raskin dari RTS-PM, dalam jangka minimal 3 hari, maksimal 1 minggu sudah harus disetorkan ke Kelurahan Kabayan.

Kecamatan Pandeglang adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan merupakan Kecamatan kota dan letaknya paling dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, dalam segala bidang Kecamatan Pandeglang selalu menjadi tolak ukur keberhasilan program bagi Kecamatan-kecamatan lain. Kecamatan Pandeglang memiliki 4 kelurahan, yakni Kelurahan Pandeglang, Kelurahan Kabayan, Kelurahan Kadomas dan Kelurahan Babakan Kalang Anyar.

Sebanyak 4 (empat) Kelurahan tersebut penulis ingin meneliti bagaimana penyaluran Raskin di Kelurahan Kabayan, dikarenakan Kelurahan Kabayan termasuk dalam Kelurahan yang letaknya di dekat kota, tetapi di kelurahan ini sebagian masyarakatnya masih miskin dan mata pencahariannya hanya sebagai petani biasa, buruh harian, buru mengelola lahan orang, pengangkut barang di pasar, tukang ojek, tukang cuci dan lain-lain, dan pekerjaan itu tidak bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara layak dan mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Dari pekerjaan mereka juga tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, karena pekerjaan itu hanya sewaktu-waktu. Tergantung dari ada dan tidaknya orang yang membutuhkannya jasa mereka.

Kelurahan Kabayan memiliki rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sebanyak 653, RTS-PM tersebut pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2010 mendapat masing-masing 13 kg dengan total keseluruhan 8.489 kg dan bulan Juni s.d Desember tahun 2010 masing-masing mendapat 15 kg dengan total 9.795 kg. Beras miskin tersebut di order dari Sub Bulog Divre

Rangkasbitung, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) sebanyak 653 Kepala Keluarga tersebut tersebar di 14 RW dan 42 RT se-Kelurahan Kabayan.

Peneliti memilih Kelurahan Kabayan sebagai fokus penelitian karena setelah observasi awal dalam penyaluran beras miskin di Kelurahan kabayan ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas beras miskin yang disalurkan ke kelurahan Kabayan masih kurang layak, beras yang diterima RTSPM beras berkualitas rendah yaitu berbau apek, berkutu dan berwarna kuning.
2. Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM, yang menerima Raskin hanya 653 orang sedangkan jumlah yang seharusnya menerima diperkirakan ada 800 RTSPM. Masing-masing RTSPM mendapat 15 kilo gram per kepala keluarga, kelurahan Kabayan hanya mendapat jatah 9.795 kilo gram beras Raskin, kelurahan Kabayan masih kekurangan Raskin sebanyak 2.205 kg untuk 147 RTSPM. Yang menetapkan kuota adalah bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang dengan Keputusan Bupati Pandeglang, didasarkan pada Pagu Raskin Kabupaten Pandeglang, data RTS Kecamatan Kelurahan Kabayan dari BPS Kabupaten Pandeglang.
3. Pada tahun 2010 Kelurahan Kabayan ada kendala dalam melakukan Pembayaran raskin, sehingga Camat Pandeglang mendapatkan teguran dari Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kab. Pandeglang dengan Nomor Surat : 500/276 Adm Per, Tanggal Surat 24 November 2010 Perihal Penyelesaian Tunggakan Raskin 2010. Karena adanya kendala

pembayaran raskin tersebut Kelurahan Kabayan dalam pendistribusian raskin nya pada tahun 2010 hanya melaksanakan 5 kali pendistribusian Raskin.

Keterlambatan pembayaran dan pendistribusian Raskin serta kualitas beras raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang merupakan suatu permasalahan dari sebuah implementasi kebijakan, dalam hal ini hambatannya bisa dari berbagai faktor termasuk lingkungan. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat Kelurahan Kabayan dalam Pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya. Peneliti ingin mengetahui masyarakat RTS-PM di Kelurahan Kabayan sudah membayar dengan lancar beras Raskin yang mereka terima atau belum, Kelurahan-kelurahan lain yang ada di wilayah kecamatan Pandeglang yaitu kelurahan Babakan Kalang Anyar, Kadomas dan Pandeglang penyaluran Raskinnya cukup baik, ini dibuktikan dengan lancarnya pendistribusian Raskin di kelurahan-kelurahan tersebut, (Wawancara dengan Pak Hilal, Staf Kesos Kecamatan Pandeglang, Tanggal 23 Agustus 2010).

Melalui uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010”**.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas maka identifikasi dari permasalahan yang peneliti angkat tentang “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang tahun 2010” adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada keseimbangan antara kuota Raskin dengan penerima beras raskin jumlah Raskin yang diterima lebih sedikit dibanding dengan jumlah RTSPM
- b. Pembayaran Raskin Kelurahan Kabayan tahun 2010 tersendat
- c. Pendistribusian Raskin Kelurahan Kabayan tahun 2010 selama 2 bulan terlambat
- d. Tentang kualitas Raskin yang diterima oleh RTSPM Kelurahan Kabayan kurang layak, beras Raskin nya berbau apek, berkutu dan berwarna kuning.

2. Pembatasan Masalah

Dalam upaya membatasi permasalahan supaya pembahasan penelitian ini tidak bias, maka permasalahan akan dibatasi sebagai berikut:

- a. Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.
- b. Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana implementasi Program raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010?
- b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Tujuan penelitian ini mengetahui sejauhmana Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Administrasi Negara.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktik

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah di lingkungan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan gambaran tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan alasan penelitian yang dilakukan.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan tema (topik/judul) dan fenomena yang akan diteliti dalam penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan diteliti.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah lebih difokuskan pada masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.

E. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.

BAB II : DESKRIPSI TEORI

Kerangka pemikiran dalam bab ini berisi tentang Teori-teori ataupun pedoman dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis untuk mendukung penyusunan penulisan ini, serta menggambarkan kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam skripsi ini mencakup metode penelitian, instrument penelitian, (informan), tehnik pengelolaan data, tehnik analisis data dan lokasi jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai data yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain :

Gambaran umum mengenai kantor Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang, serta memuat gambaran tentang implementasi program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang pada tahun 2010 dan juga memuat pembahasan hasil gambaran penelitian di lapangan.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan atas implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010

B. Saran

Berisi tentang saran-saran yang diberikan atas masalah yang ada dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

BAB II

DESKRIPSI TEORI PENELITIAN

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, kesimpulannya kebijakan publik (*publik policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

a. Definisi Kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik :

- 1) Jones, Kebijakan Publik adalah antar hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya.
- 2) Thomas R. Dye, Kebijakan Publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.
- 3) W.I Jenkins, merumuskan Kebijakan Publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta cara-cara untuk mencapainya, dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

- 4) Chief J Udoji, Kebijakan Publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan, yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
(Dalam Wahab, 2005:4-5)
- 5) Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
- 6) Carl J. Friedrich, Kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah di suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 7) James E. Anderson, Kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- 8) Amara Raksasataya, Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 elemen. Yaitu Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
- 9) George Edward III dan Ira Sharkansy, Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program pemerintah, kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
- 10) David Easton, Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau syah kepada seluruh anggota masyarakat.
(Dalam Islamy, 2007:15-19).
- 11) Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik Young dan Quinn, 2002 : 5-6)
 - (a) Tindakan pemerintah yang berwenang
Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial.
 - (b) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.
Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
 - (c) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atas strategi

dari beberapa pilihan tindakan atas strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

- (d) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan korelatif untuk memecahkan masalah sosial namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

- (e) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

(Menurut Suharto, 2005:25).

- 12) Menurut William N. Dunn (1994:17), menyatakan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivis intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

- (a) Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan, ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, diantaranya adalah :

- (1) Telah mencapai tingkat kritis tertentu, jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius.

- (2) Telah mencapai tingkat partikulantas tertentu yang berdampak dramatis.
 - (3) Menyangkut emosi, tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa.
 - (4) Menjangkau dampak yang amat luas.
 - (5) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
 - (6) Menyangkut persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).
- (b) Formulasi Kebijakan
- Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- (c) Adopsi / Legitimasi Kebijakan
- Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan, jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya tindakan pemerintah yang sah bukan dukungan untuk rezim yang menentang.
- Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
- (d) Impelentasi Kebijakan (Monitoring Kebijakan)
- Monitoring (pemantauan) adalah salah satu tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Telaah yang menyangkut monitoring terhadap suatu kebijakan biasanya disebut juga studi implementasi. Implementasi kebijakan juga memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- (e) Penilaian / Evaluasi Kebijakan
- Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
(Dalam Subarsono, 2005:8).

Analisis penulis dari definisi di atas adalah Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dan kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin juga negatif.

Hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan mengarah pada tujuan, dibagi dalam berbagai kategori yaitu:

- 1) Tuntutan Kebijakan (*Policy Demand*) Yaitu tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor lain, baik swasta ataupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.
- 2) Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*) Yaitu Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara, termasuk didalamnya keputusan untuk menciptakan statuta atau keputusan dasar, mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden). Ketetapan-ketetapan merencanakan peraturan-peraturan administratif, misalnya peraturan tentang disiplin pegawai negeri, atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- 3) Pernyataan kebijakan (*Policy Statemen*) Adalah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan negara tertentu termasuk ketetapan-ketetapan MPR. Kepres atau dekrit presiden. Peraturan administratif, dan keputusan-keputusan peradilan maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pejabat pemerintah

yang menunjukan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa yang dilaksanakan untuk mewujudkan hasrat dan tujuan tersebut.

Kesimpulannya Kebijakan Publik mengatur segala aspek dalam tatanan kenegaraan, tidak hanya menyangkut pejabat publik, tetapi mengatur juga tatanan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle, dalam Wahab (2005:59).

Kamus Webster dalam Wahab (2005:64) merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Kategori Kebijakan negara yaitu sebagai berikut:

a. *Substantive* atau *procedural policies*

Substantive policies Yaitu kebijakan-kebijakan tentang apa yang akan atau ingin dilakukan oleh pemerintah.

Prosedural policies adalah kebijakan-kebijakan tentang siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta bagaimana perumusan kebijakan itu dilaksanakan

b. *Distributive policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk. *Distributive Policies* terbagi 3 yaitu:

1) *Re Distributive Policies*, yaitu kebijakan-kebijakan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

2) *Regulatori policies*, yaitu kebijakan-kebijakan tentang penganan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau tindakan-tindakan perilaku bagi seseorang atau sekelompok orang.

3) *Self Regulatory Policies*, adalah kebijakan-kebijakan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang.

c. *Material dan symbolic policies*

Material policies adalah Kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban (kerugian) bagi yang harus mengalokasikan

Symbolic policies dalah kebijakan-kebijakan yang bersifat tidak memaksa (*non enforcemen*), karena kebijakan itu apakah akan

memberikan keuntungan atau hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat.

d. *Collective goods* dan *Private goods*

Collective good policies adalah kebijakan penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan keperluan orang banyak (kolektif)

Private goods policies adalah kebijakan-kebijakan tentang barang-barang atau pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan perseorangan (*private*) yang tersedia di pasaran bebas, dan orang yang memerlukan harus membayar biaya tertentu.

e. *Liberal Policies* dan *Conservative policies*

Liberal Policies adalah jenis kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Kebijakan liberal menghendaki agar pemerintah mengadakan koreksi terhadap ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan sosial, meningkatkan program-program ekonomi kesejahteraan.

Conservative Policies adalah lawan dari kebijakan liberal, menurut paham *conervative* aturan sosial yang ada cukup baik, jadi tidak perlu adanya perubahan sosial (bertahan dengan *statusquo*), atau walaupun perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara ilmiah.

Tahap-tahap dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:

- a) *Output-output* Kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana.
- b) Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut
- c) Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana
- d) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut
- e) Evaluasi sistim politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan isinya.

Definisi para ahli tentang Implementasi Kebijakan publik :

- a. Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. (Dalam Agustino, 2006 : 153) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.
- b. Presman dan Wildavsky, sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan.
- c. Udoji "*The execution of policies is as important than policy making. Policies will remain dreams or bive prints file jackets unless are implemented* (Pelaksanaan Kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan)
- d. Majone dan Wildavsky, usaha-usaha yang dilakukan oleh para pejabat pelaksana (*implementing official*) untuk mengubah strategi dasar (*basic strategy*) sebagai tindakan yang tidak sah atau tidak sepantasnya dilakukan, tujuan dan program perlu dimodifikasi secara terus menerus

agar tetap mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kendala dan situasi yang senantiasa berubah
(Dalam Wahab, 2005:65-67).

- e. Van Meter dan van Horn, memberikan definisi Implementasi kebijakan adalah “ Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
- f. Eugene Bardack, bahwa implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang.
(Dalam Agustino, 2006:153).

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
- c. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Sejarah Perkembangan Studi Implementasi Kebijakan tentang adanya dua pendekatan dalam rangka untuk memahami suatu implementasi kebijakan secara sederhana, yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom-up* Laster dan Stewart dalam Agustino (2006:155)

mengistilahkan pendekatan-pendekatan ini dengan sebutan *The command and control approach* (pendekatan control dan komando yang mirip dengan *top-down approach*) dan *The market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Dimana masing-masing kedua pendekatan tersebut memiliki model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

a. Pendekatan *top-down*

Dalam pendekatan *top-down* ini sebuah implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat, serta keputusannya pun diambil pada tingkat pusat, yang mana pendekatan *top-down* ini bertitik tolak dari prespektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan politik) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada tingkat bawahnya, yang mana bahwa inti dari pendekatan ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur atau birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat

- 1) Pendekatan-pendekatan Prosedural dan manajerial (*Procedural and Managerial Approach*) Prosedurnya termasuk menyangkut penjadwalan (*scheduling*), Perencanaan (*Planning*), dan pengawasan (*Control*). Logikanya adalah sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijaksanaan yang dilihat dari sudut biaya

dan efektifasnya paling memenuhi syarat, maka tahap implementasi itu akan mencakup urutan-urutan sabagia berikut:

- (a) Merancang bangun (mendesain) Program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- (b) Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, dan sumber-sumber prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
- (c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna, menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan

2) Pendekatan-pendekatan keprilakuan (*Behavioral Approach*)

Penerapan analisis keprilakuan (*behavioral analisis*) yang paling terkenal adalah:

(a) *Organizational Development*/pengembangan organisasi

OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan-penerapan ilmu keprilakuan, OD adalah lebih pada penganalisaan proses-proses pemecahan masalah, bukan hanya sarana cara-cara tertentu atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

(b) *Management By Objectives (MBO)*

MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan procedural/manajerial dengan unsur yang termuat dalam analisis keprilaku, MBO menjembatani antara tujuan-tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya.

(c) Harus ada suatu sistim penilaian atas prestasi kerja (*performance appraisal*) yang mencakup suatu kombinasi monitoring, kemampuan diri manajemen dan pengawasan melekat, dan evaluasi bersama terhadap kemampuan-kemampuan oleh tiap manajer dan atasan-atasan mereka.

3) Pendekatan-pendekatan politik (*Political Approaches*)

Keberhasilan suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh (koalisi dari kelompok-kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijaksanaan yang dikehendaki mungkin hanya akan bisa dicapai melalui suatu proses panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian diantara yang terlibat (*Partisan Mutual Adjustment*)

b. Pendekatan *bottom-up*

Pendekatan *bottom-up* memandang bahwa implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat, tetapi pendekatan *bottom-up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami, jadi pada dasarnya pendekatan *bottom-up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) dikenal dengan *Implementasi as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*autcomes*), yaitu tercapai atau

tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana pengukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang mana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu :
 - (a) Imfak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Grindle amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* :

- 1) *Content of Policy* (isi kebijakan)
 - (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
 - (b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)
 - (c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 - (d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
 - (e) *Program Implementor* (pelaksana program)
 - (f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

2) *Context of Policy* (lingkungan kebijakan)

(a) *Power, Interest and Strategi of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).

(b) *Intitution and Regime Characteristic* (karakteristik atau rejim yang berkuasa)

(c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

b. Model implementasi kebijakan George C Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwar III disebut dengan *Direct and Indirec Impact on Implementation*. Yang mana dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variable komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur biokrasi.

c. Model implementasi Donal van Meter dan Carl van Horn

Model implementasi kebijakan yang Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang disebut dengan *A Model of The Policy Implemetation*. Dimana bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model Van Meter dan Carl Van Horn mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan politik.

Menurut Van Meter dan Carl Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan.
 - 2) Sumberdaya.
 - 3) Karakteristik agen pelaksana.
 - 4) Sikap/kecenderungan para pelaksana (Disposisi Implementasi).
 - 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
 - 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
- d. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
- Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan Mazmanian dan Sabatier, dalam Wahab (2005:81) yang disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. (kerangka analisis) Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. variabel-variabel yang dimaksudkan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, besar, yaitu:
- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, yang meliputi :
 - (a) Kesukaran-kesukaran teknis.
 - (b) Keberagaman perilaku yang diatur.
 - (c) Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.

- (d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
 - (a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - (b) Digunakannya teori kausalitas yang memadai.
 - (c) Ketetapan alokasi sumber dana.
 - (d) Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.
 - (e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
 - (f) Rekrutmen pejabat pelaksana
 - (g) Akses formal pihak luar
- 3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - (a) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi.
 - (b) Dukungan publik.
 - (c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
 - (d) Dukungan dari pejabat atasan
 - (e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana
- e. Model Implementasi yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2005:71)

Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*), maka

diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- 2) Untuk Pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010, dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini penulis mengambil teori dari model implementasi kebijakan dari Tokoh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan implementasi "*As a political and Administrative Process*". Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri, yaitu isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan kebijakan (*context of policy*). Variabel-variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah :

1. Isi kebijakan (*content of policy*)
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksana program
 - f. Sumber daya yang digunakan

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

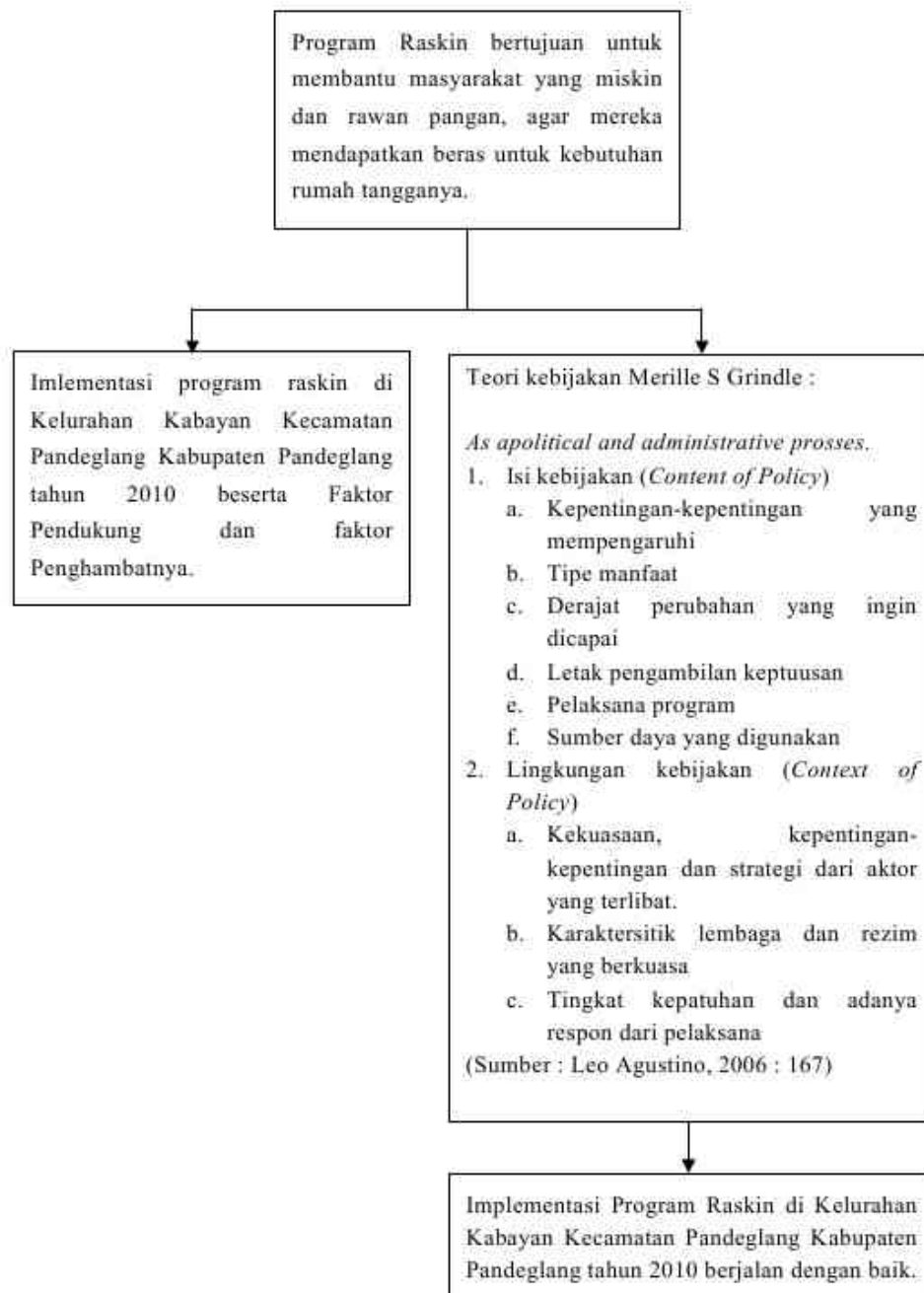
- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Dari teori tokoh Marilee S Grindle tersebut peneliti dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi penyaluran Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang. Jika dilihat dari prosesnya apakah penyaluran Raskin di kelurahan Kabayan sudah sesuai dengan design yang ditentukan, serta apakah tujuan kebijakan tercapai. Keberhasilan program Raskin di Kelurahan Kabayan dapat diukur dengan dua faktor, yaitu :

1. Efek pada masyarakat secara individu dan kelompok dengan adanya Program Raskin apakah masyarakat merasakan ada manfaat positif yang dapat mereka rasakan yaitu dapat membeli beras dengan harga murah, dan efek yang lain adalah Program Raskin dari pemerintah untuk masyarakat miskin tersebut sering diselewengkan oleh pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan pribadi, dan dengan kualitas raskin yang rendah apakah Dolog sangat diuntungkan, karena hanya mengeluarkan dana yang tidak terlalu besar dalam pembelian beras bersubsidi untuk program Raskin tersebut
2. Tingkat perubahan yang terjadi, yaitu dengan adanya program Raskin, masyarakat miskin tersebut sudah bisa sejahtera, atau sama saja seperti belum digulirkannya Program Raskin kepada mereka, bahkan Program Raskin ini tidak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Inilah yang ingin peneliti ketahui dan penulis akan melakukan riset di lapangan.

Dari analisis di atas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Berpikir



C. Asumsi Dasar

Implementasi Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena Aparatur Pemerintah nya tidak menjalankan Program Raskin sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle.

Jika teori Merilee S. Grindle dilaksanakan dengan baik sudah dipastikan Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 akan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan Program Raskin yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136). Untuk mengetahui Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif.

Sugiyono (2007 :1), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau *natural setting*.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2007 : 4-20), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset-video, bahkan data yang dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2007 : 9) :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2007:61-62), peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri antara lain :

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelami berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan dengan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksanaan.
6. Dalam manusia sebagai instrumen, respon yang aneh dan yang menyimpang diberi perhatian. Respon yang lain dari pada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber penelitian di lapangan, yaitu dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran Raskin di

Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010.

2. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi yang relevan dengan Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Serta foto kegiatan penyaluran raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang serta dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah Implementasi Program raskin tersebut.
3. Wawancara, merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (petunjuk umum wawancara) dan percakapan tersebut direkam dengan menggunakan *tape recorder*.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :

1. Buku catatan : untuk mencatat percakapan dengan sumber data.
2. Alat Perekam : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan/subyek penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara (*interview*). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder yang dipakai yaitu Buku Juknis Raskin dari Menkokesra Pusat, Monografi Kelurahan Kabayan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakipkel) Kabayan, serta surat dan proposal pengajuan beras miskin Kelurahan Kabayan Tahun 2010.

Berdasarkan sumber data primer di atas berupa hasil wawancara, untuk mempermudah dan memfokuskan masalah penelitian maka disusunlah pedoman wawancara dengan berbagai kisi-kisi pertanyaan berdasarkan indikator variabel penelitian, yaitu sebagai berikut :

Table 1
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Variabel	Sub Variabel	Indikaot	No. Item Pertanyaan
Implementasi Kebijakan	<i>Content of Policy</i>	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan	A 1
		Tipe Manfaat	B 1, 3,4,5, 6,7,8,9
		Derajat perubahan yang ingin dicapai	C 1,2,3,4,5, 6,7,8,9
		Letak pengambilan keputusan	D 1 dan 2
		Pelaksana Program	E 1,2,3,5
		Sumber-sumber daya yang digunakan	F 1, 2 dan 5
	<i>Context of Policy</i>	Kekuasan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	G 1 dan 2
		Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	H 1 dan 2
		Tingkat Kepatuhan dan respon pelaksana	I 1,2 dan 5

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*. Yaitu : Teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu yang sengaja ditentukan oleh peneliti, akan tetapi tidak melalui proses pemilihan seperti yang dilakukan dalam teknik random.

Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholders* implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang yaitu Camat Pandeglang, Lurah Kabayan, Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa, Ibu RW 05 Kp. Cikaung, Ketua RW 14 Kp. Mangkubumi, dan masyarakat RTS-PM di RW 07 Kp. Pasir Kalapa, RW 05 Kp. Cikaung, RW 14 Kp. Mangkubumi Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang sampel dalam penelitian kualitatif ini disebut Informan.

Tabel 2 Informan Penelitian

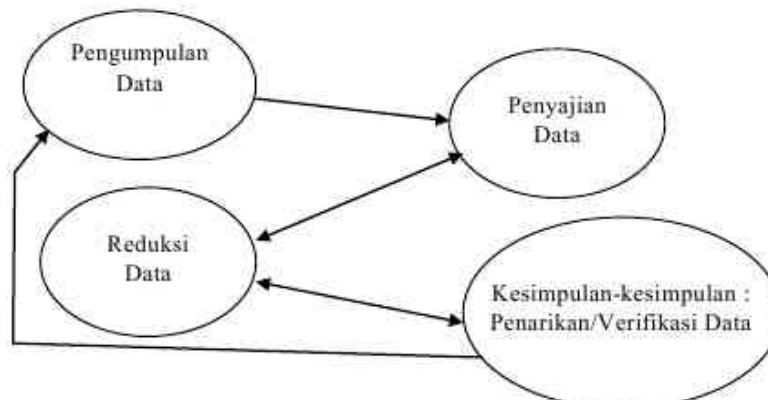
No	Informan	Keterangan
1	Camat Pandeglang Hj. Nuriah, M.Si.	Tim Kordinator Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan Pandeglang
2	Lurah Kabayan Eman Santosa, SH	Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Kelurahan di Wilayah Kelurahan Kabayan
3	Moh. Hilal Rayendra	Staf Kesos Petugas Pelaksana Program Raskin Tingkat Kecamatan Pandeglang
4	Cece Husaeni	RW 07 Kp. Pasir Kalapa
5	Unaenah	Ibu RW 05 Kp. Cikaung
6	Sudarma	Ketua RW 14 Kp. Kumalirang
7	Dedeh Nurhasanah	RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa
8	Uun Husniar	RTSPM RW 05 Kp. Cikaung
9	Enah	RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi. Mengingat penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (1992:15), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2
Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)
Miles dan Huberman (1984)



(Sumber : Sugiyono, 205:92)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumparan tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian (Miles dan Huberman, 1999:19-20). Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Daya yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan cara memaparkan hasil temuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu dapat berupa grafik, matriks, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.

Pemeriksaan kabsahan data yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk itu teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber menurut Paton dalam Moleong (2005:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

E. Pengujian Keabsahan data

Susan Stainback (Sugiyono, 2007: 119) menyatakan pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas, yang artinya, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pengujian kredibilitas data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan dosen pembimbing, orang yang kompeten dibidangnya, dan *member check*, artinya bagaimana proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Kemudian triangulasi waktu yang dapat mempengaruhi data. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 lokasinya di Kantor Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, beralamat di Jl. Raya Rangkasbitung KM 1 Kabayan Kecamatan Pandeglang.

Untuk mendapatkan data yang relevan maka penelitian ini dilakukan selama empat belas bulan mulai dari Pebruari 2010 April 2011 untuk lebih jelasnya maka dibuat jadwal penelitian sebagai berikut :

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum

Kelurahan Kabayan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan Pandeglang. Luas wilayah kelurahan Kabayan 427,536 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Kelurahan Pandeglang dan Kelurahan Kadu Merak
- b. Timur : Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong
- c. Selatan : Kelurahan Babakan Kalang Anyar, Kelurahan Kadomas dan Kelurahan Karaton
- d. Barat : Kelurahan Pandeglang

Pusat Pemerintahan Kelurahan terletak di Kabayan, sekitar 0,2 KM dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pandeglang dan 0,5 KM dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.

Kelurahan Kabayan umumnya merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan ketinggian 200 M di atas permukaan laut. Kelurahan Kabayan memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 3600 mm/tahun dan rata-rata suhu 20°C-32°C.

Wilayah Kelurahan Kabayan terdiri dari 14 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT) serta kelembagaan masyarakat lainnya :

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Karang Taruna.

Nama-nama Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan Kabayan antara lain :

- a. RW 01 : Kabayan Citiis, 3 RT
- b. RW 02 : Kabayan Mesjid, 4 RT
- c. RW 03 : Pasar Heubeul, 4 RT
- d. RW 04 : Kabayan Cibunut, 3 RT
- e. RW 05 : Cikaung, 2 RT
- f. RW 06 : Kumalirang, 4 RT
- g. RW 07 : Pasir Kalapa, 3 RT
- h. RW 08 : Tenjolaya Lebak, 3 RT
- i. RW 09 : Kadupeusing, 3 RT
- j. RW 10 : Kadubanen, 3 RT
- k. RW 11 : Cikole, 3 RT
- l. RW 12 : Tenjolaya Pasir, 3 RT
- m. RW 13 : Kabayan Kota, 3 RT
- n. RW 14 : Mangkubumi, 4 RT

Jumlah penduduk Kelurahan Kabayan berdasarkan data bulan Desember 2010 sebanyak 9.645 jiwa. Terdiri dari 4.878 jiwa laki-laki dan 4.768 jiwa perempuan.

Kelurahan Kabayan memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang heterogen dan beraneka ragam dengan tingkat sensitivitas yang tinggi

bila dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di lingkungan kecamatan Pandeglang. Wilayah Kelurahan Kabayan termasuk ke dalam wilayah perkotaan dengan jarak yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang hanya sekitar 0,5 KM dan dari pusat Pemerintahan Kecamatan Pandeglang hanya sekitar 0,2 KM dengan akses jalan yang strategis. Selain itu, wilayah Kelurahan Kabayan diimbangi dengan potensi lahan anara pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kecil menengah dan heterogen ini memiliki potensi-potensi keberagaman dan cenderung kepada konflik antar individu maupun golongan.

Kelurahan Kabayan yang terletak di daerah barat Kabupaten Pandeglang memiliki demografi wilayah yang cukup unik dimana mencakup lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industirk kecil menengah. Potensi ini merupakan hal yang menjadi keunggulan dibanding wilayah Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Pandeglang.

Selain faktor eksternal yang berpengaruh di atas, Kelurahan Kabayan juga ditunjang dengan factor internal yang mendukung pelaksanaan program-program Kelurahan Kabayan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pegawai yang berjumlah 22 orang, dengan latar belakang pendidikan yang beragama yaitu SLTP, SLTA, D3, D4 dan S1. Berdasarkan kondisi pegawai tersebut maka Kelurahan Kabayan memiliki potensi Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai dalam melaksanakan

program-program kelurahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabayan

a. Struktur Organisasi

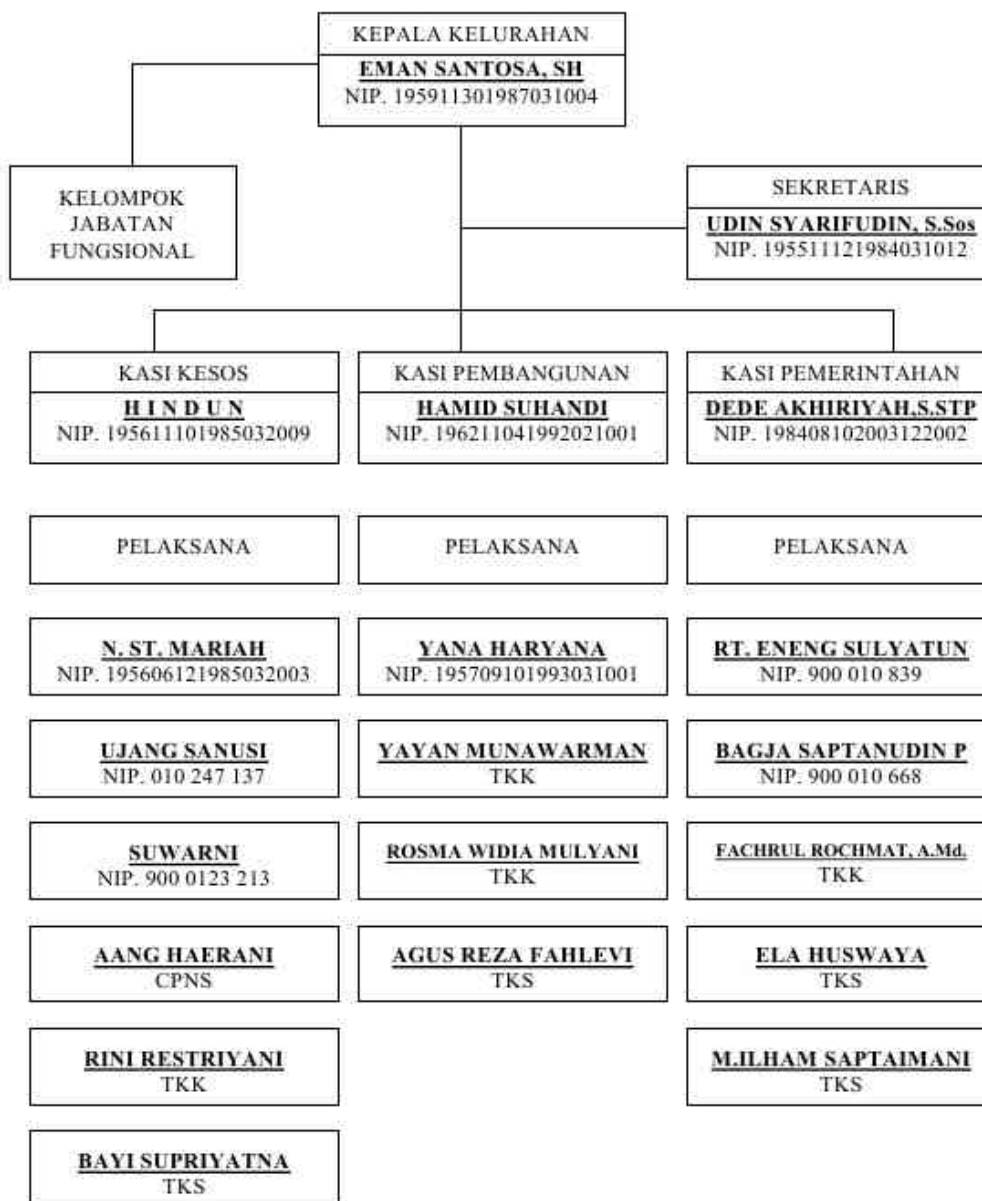
Kelurahan Kabayan dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Struktur organisasi Kantor Kelurahan Kabayan terdiri dari :

- 1) Lurah
- 2) Sekretaris Kelurahan
- 3) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 4) Seksi Pembangunan
- 5) Seksi Pemerintahan

Selain pejabat eselonering Kantor Kelurahan Kabayan di atas dapat dijabarkan kondisi pegawai Kantor Kelurahan Kabayan sebagai berikut:

- 1) PNS : 11 orang
- 2) CPNS : 1 orang
- 3) TKK : 4 orang
- 4) TKS : 4 orang

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABAYAN



PERDA KABUPATEN PANDEGLANG
 Nomor 6 Tahun 2008
 Tanggal 18 Juli 2008

b. Kedudukan Kelurahan Kabayan

Kedudukan Kelurahan Kabayan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang di wilayah kerja Kecamatan Pandeglang, Kelurahan Kabayan dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat Pandeglang.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pejabat Esselonering Kantor Kelurahan Kabayan sebagai berikut :

1) Lurah

Tugas : Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lingkup kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintah dilimpahkan ke Bupati meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, kegiatan kesos, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kelembagaan lingkup Rukun Warga.

- Fungsi :
- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kelurahan
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan Kesatuan bangsa lingkup Rukun warga
 - d. Pengkoordinasian kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang Posyandu dan Kebersihan
 - f. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Kesos
 - g. Pelaksanaan Penata Usahaan Kelurahan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati secara Tupoksi.

2) Sekretaris Kelurahan

Tugas : Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan kepegawaian
 - b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial

- Fungsi :
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan social
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.

4) Seksi Pembangunan

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan

Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan

5) Seksi Pemerintahan

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan

Fungsi : e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan

f. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan

g. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

h. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

3. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat beserta pemerintah membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara yang madani. Secara Normatif Visi Kelurahan Kabayan adalah sebuah tatanan masyarakat yang terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan, berguna dan berhasil guna, bertanggungjawab, dan bertanggungjawab, komprehensif, terukur, efektif dan efisien.

Visi Kelurahan Kabayan adalah *“Melalui pelayanan prima mewujudkan Kelurahan Kabayan sebagai daerah kondusif menuju masyarakat yang berkualitas”*.

Penjelasan Visi :

Kelurahan kabayan dalam mewujudkan daerah yang kondusif dan pemertahaan pembangunan, pelayanan administrasi serta pemberdayaan masyarakat dilakukan secara optimal. Masyarakat yang berkualitas yaitu masyarakat/keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan dan bertanggungjawab.

Misi Kelurahan Kabayan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang produktif dan memiliki semangat kerja dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lembaga/organisasi kemasyarakatan
- c. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Camat Pandeglang : Hj. Nuriah, M.Si
- b. Lurah Kabayan : H. Eman Santosa, SH
- c. Staf Kesos Kecamatan Pandeglang : Moh. Hilal Rayendra, S.Ag.
- d. Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa : Cece Husaeni
- e. Ketua RW 05 Kp. Cikaung : Unaenah
- f. Ketua RW 06 Kp. Kumalirang : Sudarma
- g. RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa : Dedeh Nurhasanah
- h. RTPM RW 05 Kp. Cikaung : Uun Husniar
- i. RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi : Enah

Tabel 4 Informan Penelitian

No	Kode Informan (i)	Jabatan Informan	Jenis Kelamin	Umur / Usia
1	i ₁	Camat Pandeglang	P	45 tahun
2	I ₂	Lurah Kabayan	L	42 tahun
3	I ₃	Staf Kesos Kantor Kecamatan Pandeglang	L	38 tahun
4	I ₄	Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa	L	48 tahun
5	I ₅	Ibu RW 05 Kp. Cikaung	P	40 tahun
6	I ₆	Ketua RW 14 Kp. Mangkubumi	L	67 tahun
7	I ₇	RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa	P	24 tahun
8	I ₈	RTSPM RW 05 Kp. Cikaung	P	45 tahun
9	I ₉	RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi	P	29 tahun

B. Deskripsi dan Analisis Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Model Implementasi Kebijakan menurut Merilee S Grindle. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Variabel-variabel yang mempengaruhi suatu implementasi yaitu :

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksana program
 - f. Sumber daya yang digunakan
2. Lingkungan Kebijakan
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat

deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data hasil dokumentasi lainnya.

Dengan menggunakan teknik data kualitatif menggunakan konsep yang diberikan oleh Merilee S Grindle, data-data tersebut dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya yang diberikan kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi dalam penyusunan jawaban penelitian, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu :

1. Kode P_{1,2,3} dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan
2. Kode I₁₋₉ menandakan daftar urutan informan

Setelah peneliti memberikan kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban tersebut dan mencari data penunjang yang akan memperkuat dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian maka semua jawaban yang dikemukakan oleh informan dalam pembahasan penelitian ini disesuaikan dengan teori dari Merilee S Grindle.

Berdasarkan teori tersebut berikut ini kategori yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yaitu : Implementasi Program Beras

Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010, dipengaruhi oleh :

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Indikatornya meliputi :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

b. Tipe Manfaat

Manfaat apa yang dirasakan oleh warga miskin Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan digulirkannya Program Raskin oleh Pemerintah Pusat.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Dengan digulirkannya program Raskin ke daerah-daerah derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Keputusan apa yang diambil jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

e. Pelaksana program

Siapa saja yang melaksanakan program Raskin di tingkat Kabupaten Pandeglang sampai dengan tingkat Kelurahan Kabayan.

f. Sumber daya yang digunakan

Bagaimana sumber daya aparatur kelurahan Kabayan

2. Lingkungan Kebijakan (*Contex of policy*)

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang

terlibat untuk mensukseskan Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang strategi apa yang dilakukan oleh camat Pandeglang agar Kelurahan Kabayan dapat mengatasi keterlambatan pembayaran raskinnya, agar pendistribusian Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang lancar dan tidak terlambat. Sedangkan untuk Kelurahan Kabayan strategi apa yang akan dilakukan agar pembayaran raskinnya tidak ada hambatan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Bagaimana karakteristik kelurahan Kabayan sehingga pembayaran Raskin di kelurahan ini terlambat, dan bagaimana karakteristik dari lurah Kabayan serta aparaturnya.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur kelurahan Kabayan dalam pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010, serta faktor pendukung dan penghambat Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Raskin adalah Program Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Di samping itu dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS tahun 2008 yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin dengan alokasi 13 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600/kg Netto di titik distribusi.

Sebelum tahun 1998 kebijakan pemerintah dalam bidang perberasan di Indonesia adalah memberikan subsidi kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang mampu (*general subsidy*), namun sejak krisis ekonomi bulan Juli 1998 kebijakan subsidi beras diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu (*Targeted Subsidy*) melalui Operasi Pasar Khusus (OPK), yang kemudian berubah menjadi Raskin (beras bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin) pada tahun 2002, dengan perubahan kebijakan subsidi dari *general targeted* ke *targeted subsidy*, maka subsidi hanya diberikan kepada masyarakat miskin.

Program Raskin di Kelurahan Kabayan merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak, yaitu aparat kelurahan, lembaga musyawarah desa, LSM, serta tokoh masyarakat. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan Tingkat

Pencapaian Indikator 6 Tepat (6T), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Kelurahan Kabayan bukan satu-satunya Kelurahan/Desa di Kabupaten Pandeglang yang menunggak Raskin, seperti yang ditulis oleh surat kabar Satelit News edisi Kamis, 23 Desember 2010. Menurut surat kabar tersebut Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, SH., M.Si. mengatakan tidak terserapnya beras untuk rakyat miskin (Raskin). Karena masih banyak desa atau kelurahan di Kabupaten Pandeglang yang menunggak. Untuk Desa/Kelurahan yang menunggak bagian perekonomian tidak bias mendistribusikan Raskin. Namun bila ada pengajuan dari Desa dan sudah lunas tunggakan, bagian perekonomian akan langsung memproses tanpa memperlambat pengajuan tersebut. (Sumber : Surat Kabar Harian Satelit News Edisi Kamis, 23 Desember 2010, sumber terlampir).

Terkait tunggakan Raskin Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2010 kepada Bulog Sub Divisi Regional Rangkasbitung sebesar Rp. 1.825 miliar, DPRD Kabupaten Pandeglang Komisi IV telah memanggil Kabag Perekonomian Pemkab Pandeglang selaku koordinator Pelaksana Program Raskin tahun 2010. Tahun 2011 Kabupaten Pandeglang mendapat Kuota Raskin 22.917.240 kg dan akan disalurkan kepada 127.318 Kepala keluarga. (Sumber : Antara News Edisi Minggu, 6 Pebruari 2011, sumber terlampir)

Upaya peningkatan kualitas beras Perum Bulog melakukan perbaikan survey kualitas dan penekanan susut melalui pelarangan penggunaan ganco dalam pelaksanaan *handling* beras oleh buruh bongkar muat.

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTM (Rumah Tangga Miskin) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Raskin tahun 2010 di kelurahan Kabayan adalah berkurangnya beban pengeluaran 653 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras besubsidi sebanyak 156 kilogram/RTS/tahun atau setara dengan 13 kilogram/RTS per bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kilogram Netto di titik distribusi.

2. Pengelolaan dan pengorganisasian program Raskin Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

a. Pengelolaan

- 1) Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin.
- 2) Transparansi
- 3) Partisipatif
- 4) Akuntabilitas

b. Pengorganisasian

Kelurahan Kabayan merupakan pelaksana distribusi Raskin di tingkat Kelurahan. Kepala kelurahan/Lurah Kabayan sebagai penanggung

jawab pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran HPB serta administrasi distribusi Raskin di wilayah kelurahan Kabayan.

1) Kedudukan

Pelaksana distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

2) Tugas

(a) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan /menjual kepada RTS-PM Raskin di titik distribusi.

(b) Menerima hasil penjualan beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk divisi regional/sub divisi regional/Kansilog Perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.

(c) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penerima Beras sesuai model DPM 2.

3) Fungsi :

(a) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin

(b) Penerima uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog

(c) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTSPM Raskin.

3. Kedudukan, Organisasi dan Tugas Kewenangan Satker Raskin Sub Divisi Regional Rangkasbitung

a. Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasub Divreg/Kakansilog Perum Bulog sesuai tingkatannya.

b. Organisasi

Satker Raskin terdiri dari :

1) Ketua

2) Anggota

(a) Pegawai Perum Bulog yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivreg/Kasub Divreg/Kakansilog Perum Bulog

(b) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh Ketua Satker atas sepengetahuan Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog.

c. Tugas dan Kewenangan

Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :

1) Ketua

(a) Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog.

(b) Mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi penyelesaian HPB dan administrasi Raskin.

2) Anggota

Mempunyai tugas membantu bersama Ketua sebagai berikut :

- (a) Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi raskin di titik distribusi.
- (b) Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari pelaksana distribusi Raskin dan menyetor ke rekening HPB Bulog.
- (c) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan Model MBA-O dan Pembayaran HPB (Tanda Terima Kuitansi dan BUKTI Setor Bank) serta mengumpulkan DPM 2 dari titik distribusi.
- (d) Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : Realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Peurm Bulog secara periodic setiap bulan.

4. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan

a. Pagu Raskin

Pagu Raskin kelurahan Kabayan ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang yaitu Bagian administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang dengan Keputusan Bupati Pandeglang. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan didasarkan pada :

- 1) Pagu Raskin Kabupaten Kota
- 2) Data RTS Kecamatan, Kelurahan Kabayan dari BPS

Apabila Pagu Raskin di Kelurahan Kabayan tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2010, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2011.

- b. Penetapan rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang
 - 1) RTM yang berhak mendapat Raskin di kelurahan Kabayan adalah RTM yang terdaftar dalam PPhs 08 BPS sebagai RTS di desa/kelurahan.
 - 2) Dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan untuk menetapkan nama-nama RTS-PM kelurahan Kabayan, verifikasi nama RTS yang sudah pindah atau meninggal dunia diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. RTM yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai RTS dapat diberikan Raskin.
 - 3) RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil musyawarah kelurahan di masukkan dalam Daftar RTS PM sesuai Model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah Kabayan dan disahkan oleh Camat Pandeglang.
 - 4) Data RTS-PM Raskin di Kelurahan Kabayan direkap di tingkat Kecamatan Pandeglang dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang yaitu Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang.

e. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Kantor Kelurahan Kabayan merupakan tempat penyerahan Raskin antara Satker Raskin yaitu Sub Divisi Regional I Rangkasbitung kepada Pihak Kelurahan Kabayan selaku Pelaksana Distribusi Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang.

d. Mekanisme Distribusi dan Adminstrasi

Pendistribusian beras dari gudang Bulog Sub Divre I ke titik distribusi Kantor Kelurahan Kabayan sebagai berikut :

- 1) Bupati Pandeglang menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kepala Sub Divisi Regional Rangkasbitung berdasarkan Pagu Raskin dan rincian di Kelurahan Kabayan.
- 2) Pada waktu beras akan didistribusikan ke titik distribusi Kasub Divre I Rangkasbitung berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras kepada Satker Raskin. Apabila pembayaran HPB pada periode sebelumnya menunggak maka penerbitan SPPB/DO untuk kelurahan Kabayan ditangguhkan sampai ada pelunasan.
- 3) Berdasarkan SPPB/DO Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, menangkut dan menyerahkan Beras Raskin kepada Kelurahan Kabayan selaku Pelaksana Distribusi raskin di titik distribusi.
- 4) Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar maka pelaksana distribusi Raskin langsung mengembalikan

beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.

- 5) Pelaksanaan penjualan beras kepada RTS-PM Raskin merupakan pemegang Kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan melalui hasil musyawarah di tingkat kelurahan. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat 2) daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh Lurah Kabayan.
- 6) Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh Satker Raskin Sub Divre I Rangkasbitung dan Pelaksana Distribusi Raskin, diketahui oleh Lurah Kabayan.
- 7) Satker Raskin Sub Divre I Rangkasbitung membuat rekapitulasi Berita Acara serah terima (BAST) di setiap kecamatan sesuai model MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin Sub Divre I Rangkasbitung dan Camat Pandeglang.
- 8) Sub Divre I Rangkasbitung Perum Bulog membuat Rekapitulasi MBA-O sesuai MBA-I dan ditandatangani oleh Kasub Divre Perum Bulog dan Bupati Pandeglang/Pejabat lain yang berwenang.

e. Mekanisme Pembayaran dan administrasi di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

- 1) Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelurahan Kabayan dilakukan secara tunai.
- 2) Pembayaran HPB Raskin dari Kelurahan Kabayan kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM
- 3) Uang HPB Raskin yang diterima kelurahan Kabayan dari RTS-PM langsung diserahkan kepada Sub Divre I Rangkasbitung, yaitu melalui Rekening HPB Bulog
- 4) Pembayaran HPB Raskin tersebut dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Bukti Setor asli Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- 5) RTS-PM yang tidak mampu membayar secara tunai maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan model MJ dari lurah Kabayan yang diketahui Camat Pandeglang dan dilampiri Daftar Nama RTS-PM Raskin yang belum membayar secara tunai.
- 6) Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang yaitu bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang melakukan penagihan ke kelurahan Kabayan.

f. Pembiayaan

- 1) Distribusi Raskin disediakan oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam undang-undang No. 47 tahun 2009 tentang APBN 2010.
- 2) Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan di Titik Distribusi Kelurahan Kabayan menjadi tanggung jawab Perum Bulog.
- 3) Biaya operasional Raskin dari titik distribusi kelurahan Kabayan sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dialokasikan dalam APBD dan sumber dana lainnya.
- 4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari titik distribusi (kelurahan) sampai ke RTS-PM
- 5) Segala kegiatan Tim Koordinasi Provinsi Banten/Kabupaten/Kecamatan dan kelurahan serta Satker Raskin dibiayai dari APBD dan atau BOP Perum Bulog.

g. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

- 1) Monitoring dan evaluasi program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Pandeglang.

- 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang

h. Pengawasan

- 1) Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan masyarakat terbuka melalui mekanisme yang berlaku, yaitu oleh LSM, media, baik media cetak maupun televisi.

i. Pelaporan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Pandeglang melaporkan Pelaksanaan Program raskin kepada Camat Pandeglang. Sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten Pandeglang yaitu Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang secara periodik setiap Triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-O (LT-O). Laporan akhir Pelaksana Program Raskin tahun 2010 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota pada akhir tahun. Secara internal Sub Divre melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1 Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum Bulog melalui Divisi Penyaluran sesuai model ML-2.

Tabel 5
Jumlah Masyarakat Yang Menerima Raskin
Di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang

No	Nama RW	Nama Kampung	Jumlah RT	Jumlah RTSPM
1	RW 01	Kp. Kabayan Citiis	3	42
2	RW 02	Kp. Kabayan Masjid	4	17
3	RW 03	Kp. Pasar Heubeul	1	5
4	RW 04	Kp. Kabayan Cibunur	3	27
5	RW 05	Kp. Cikaung	2	29
6	RW 06	Kp. Kumalirang	4	70
7	RW 07	Kp. Pasir Kalapa	3	61
8	RW 08	Kp. Tenjolaya	3	46
9	RW 09	Kp. Kadu Peusing	3	60
10	RW 10	Kp. Kadu Banen	3	29
11	RW 11	Kp. Cikole	3	88
12	RW 12	Kp. Tenjolaya Pasir	3	38
13	RW 13	Kp. Kabayan Kota	3	16
14	RW 14	Kp. Mangkubumi	4	125
Jumlah			42	653

(Sumber : Bagian Kesos Kantor Kecamatan Pandeglang)

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 dipengaruhi oleh :

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Menurut P_1 I_1 , kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah :

“Secara political mengacu pada isu strategis pengentasan kemiskinan melalui visi dan misi Kabupaten Pandeglang yaitu tentang kesejahteraan rakyat, dengan digulirkannya program-program pemerintah, untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Program Beras Miskin, agar kesejahteraan warga miskin dapat terangkat. Implementasi Program Raskin yang dikejar bukan kepentingan, karena yang dikejar kepentingan akan ada kesenjangan-kesenjangan antara tujuan Program Raskin daengan Stakeholder di pemerintahan”.

Implementasi adalah pelaksanaan teknis di lapangan. Teori di lapangan RTS-PM mendapat 15 kg. tetapi dikarenakan jumlah RTS-PM lebih banyak dari kuota ada kebijakan lain berdasarkan musyawarah masyarakat di kelurahan Kabayan RTS-PM hanya mendapat 13 kg itu untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan Kabayan bukan kepentingan camat.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang, NR. 45 tahun)

Analisa peneliti bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 secara politikal di lapangan adalah melalui isu strategis pengentasan kemiskinan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok yaitu beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanak 156 Kg/RTS per tahun atau setara dengan 13 kg per RTS per bulan dengan harga tebus Rp. 1600 per kilogram netto di titik distribusi Camat dan Lurah tidak mempunyai kepentingan apapun dalam penyaluran beras Raskin.

b. Tipe Manfaat

Menurut P₂ I₁, manfaat yang dirasakan oleh warga miskin Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan digulirkannya Program Raskin oleh Pemerintah Pusat adalah :

“Dengan digulirkannya Program Raskin, kesejahteraan warga miskin dapat meningkat”.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang)

Berdasarkan pernyataan di atas analisis peneliti adalah Program Raskin ini sangat bermanfaat bagi warga miskin, mereka dapat membeli beras untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yaitu beras dengan harga yang murah. Program Raskin ini sangat membantu RTS-PM untuk mengurangi beban Rumah Tangga mereka.

Sedangkan menurut P₂ I₃ yaitu :

“Raskin adalah salah satu Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan Rawan Pangan agar mereka mendapatkan beras murah untuk kebutuhan mereka sehari-hari”.

(Wawancara dengan MH. 38 tahun Staf Kesos Kec. Pandeglang)

Analisis peneliti pernyataan tersebut menguatkan pernyataan dari informan sebelumnya, yang menyatakan Program Raskin ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga miskin, jika warga miskin dapat membeli beras berarti mereka dapat kesejahteraan karena kebutuhan pangan pokok mereka terpenuhi. Harga beras yang mahal membuat warga miskin tidak dapat membeli beras, akibatnya banyak warga miskin yang kelaparan, dengan digulirkannya Program Raskin yaitu beras bersubsidi dari pemerintah, warga miskin tersebut dapat membeli beras karena Raskin ini hanya Rp. 1.600 / kg bersih di titik distribusi.

Menurut P₂ I₄,

“Warga RW 07 Kp. Pasir Kalapa sangat berterimakasih karena merasa terbantu, dan mengurangi beban mereka meskipun mendapat jatah Raskinnya 1 bulan sekali, karena mata pencaharian masyarakat di RW 07 Pasir Kalapa kebanyakan

petani, dan jika gagal panen mereka tidak dapat memiliki penghasilan dan yang mendapat Raskin tersebut kebanyakan adalah orang lanjut usia yang sudah tidak dapat bekerja.”
(Wawancara dengan Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa CH. 48 tahun)

Analisa peneliti berdasarkan analisa di atas adalah Warga RW 07 Kp. Pasir Kalapa merasa terbantu dengan digulirkannya Program Raskin tersebut, karena beban RTSPM Kp. Pasir Kalapa berkurang, meskipun jatah Raskinnya hanya turun 1 bulan sekali. Mata pencaharian masyarakat di RW 07 yang mayoritas petani tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap. Oleh karena itu jika gagal panen masyarakat RW 07 kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang mendapat Raskin di RW 07 Kp. Pasir Kalapa adalah orang-orang yang sudah lanjut usia.

Sedangkan menurut P₂ I₅ sebagai berikut :

“Membantu keluarga miskin untuk mendapat beras untuk kebutuhan sehari-hari”
(Wawancara dengan Ibu RW 05 Kp. Cikaung, Un. 40 tahun)

Menurut analisa peneliti tentang pernyataan di atas adalah sama dengan pernyataan dari RW 07 Kp. Pasir Kalapa, yaitu dengan digulirkannya Raskin masyarakat terbantu untuk mendapatkan beras sehari-hari.

Kemudian Ibu RW 05 Kp. Cikaung menambahkan :

“Pendistribusian dari Bulog lancar tetapi suka ditombokin oleh RW, kemarin waktu didistribusikan yang terakhir ditombokin oleh RW yaitu sebesar Rp. 300.000 dan sampai sekarang masih ada RTSPM yang belum membayar kepada saya. Tetapi ke kelurahan mah sudah dilunasi. Karena jatah dari Kelurahan untuk penyeteroran Raskin ke kelurahan minimal 3 hari setelah didistribusikan dan maksimal 1 minggu”
(Wawancara dengan Ibu RW 05 Kp. Cikaung, Un. 40 tahun)

Analisa peneliti berdasarkan pernyataan di atas :

Kelurahan memberi waktu maksimal 1 minggu kepada RW se Kelurahan Kabayan untuk melunasi uang pendistribusian Raskin ke RT/RW masing-masing, oleh karena itu RW 05 Kp. Cikaung menombok dahulu memakai uang pribadinya agar setoran Raskin ke kelurahan dapat dilunasi, tetapi dari RTS-PM nya tidak lancar, karena sampai berbulan RTS-PM tersebut belum mengganti uang RW 05 Kp. Cikaung yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 300.000.

Menurut P₂ I₆,

“Kami masyarakat di RW 14 Mangkubumi merasa bersyukur dengan diturunkan Program Raskin ini, kami juga merasa berterima kasih karena kami merasa terbantu dan pengeluaran sehari-hari dapat berkurang”.

(Wawancara dengan Ketua RW 14 Kp. Mangkubumi Bapak SM. 67 tahun)

Analisa peneliti tentang pernyataan di atas :

Sama seperti Ketua RW 07 Pasir Kalapa, Ibu RW 05 Kp. Cikaung, bahwa dengan digulirkannya Raskin ini masyarakat RTS-PM di RW 14 Kp. Mangkubumi merasa terbantu karena pengeluaran sehari-hari berkurang, dikarenakan 80 persen masyarakat RW 14 Mangkubumi mayoritas petani, Ketua RW 14 Mangkubumi mengeluarkan kebijakan yaitu seluruh warga di RT 02 Mangkubumi mendapatkan Raskin, yaitu hasil musyawarah dengan RT dan masyarakat RTS-PM di RW 14 Kp. Mangkubumi dengan catatan warga mengambil Raskinnya setelah memiliki uang, dan tidak ada sistim menunggak. Tetapi selama ini

pembayaran Raskin di Kp. Mangkubumi selalu lancar. Jika belum punya uang masyarakat belum bisa mengambil Raskin dari RT.

P₂ I₇, tentang manfaat Raskin :

“Membantu warga, tetapi beras yang diterima berbeda-beda, bulan ini berasnya kuning dan bulan berikutnya bagus. Beras Raskin sangat membantu apalagi yang keluarganya banyak”.
(Wawancara dengan RTS-PM RW 07 Kp. Pasir Kalapa, DH. 24 tahun)

Kemudian Ketua RW 14 Kp. Mangkubumi menambahkan :

“Seharusnya yang mendapat Raskin di RW 14 lebih banyak yaitu 125 orang tetapi kuota Raskinnya kurang, karena penetapan RTSPM merupakan hasil musyawarah RTSPM di Mangkubumi yang mendapat jatah Raskin hanya 70 orang”.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi

En. 29 tahun.

“Ada kebijakan dari Pak RT, seluruh warga di RT 02 Kp. Mangkubumi mendapatkan Raskin karena 80 persen warga masyarakat di Kp. Mangkubumi mata pencahariannya petani, warga mengambil Raskin setelah kami memiliki uang untuk menebusnya. Jadi tidak ada sistim menunggak dan pembayaran di Kp. Mangkubumi lancar, jika belum punya uang kami tidak berani mengambil Raskinnya dari RT”.
(Wawancara dengan En. RTSPM Kp. Mangkubumi RW 14)

Sedangkan untuk manfaat Raskin, En. menambahkan :

“Masyarakat RTSPM terbantu 2 hari dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, jumlah Raskin nya tolong ditambah untuk jangka waktu 1 bulan, dan kualitas berasnya agar diperbaiki, jangan beras berbau apek, berkutu, berwarna kuning”.
(Wawancara dengan En. 29 tahun RTSPM Kp. Mangkubumi RW 14)

Analisis peneliti menurut pernyataan di atas adalah :

Jumlah kuota Raskin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah RTSPM di RW 14 Kp. Mangkubumi.

Analisa peneliti berdasarkan pernyataan di atas :

RTSPM RW 07 Pasir Kalapa sependapat dengan Ketua RW dan RTSPM yang diwawancara sebelumnya bahwa RTSPM di RW 07 pun merasa terbantu, meskipun beras Raskin ini kualitasnya rendah yaitu berwarna kuning. Bagi yang keluarganya banyak Beras Raskin ini sangat meringankan. Karena bagi yang anggota keluarganya banyak, mereka tidak cukup jika membeli Raskin hanya 1 atau 2 liter. Sementara harga beras dipasaran itu yang kualitas sedang sudah mencapai Rp. 6.500 dengan beras Raskin harganya jauh lebih murah yaitu hanya Rp. 1.600 / kg.

c. Derajat Perubahan yang ingin dicapai oleh Pemerintah

Menurut P₃ I₁, dengan digulirkannya Program Raskin ke daerah-daerah derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah.

“Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah agar beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) berkurang, tujuannya meningkatkan akses masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, dan melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional”.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang NR. 45 tahun).

Analisis peneliti dari pernyataan di atas adalah dengan digulirkannya Program Raskin ini pemerintah mengharapkan masyarakat miskin, petani dalam negeri khususnya di sektor pertanian dapat lebih sejahtera dan meningkat. Jika sektor pertanian meningkat maka ekonomi pedesaan berkembang dan stabilitas ekonomi nasional akan naik.

Menurut P₃ I₂, adalah :

“Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh masyarakat khususnya di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah masyarakat lebih sejahtera, dan mereka tidak susah lagi membeli beras. Saya ingin masyarakat di kelurahan Kabayan ini dapat membayar jatah Raskin mereka, agar mereka punya beras untuk makan sehari-hari”.
(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES.42 tahun)

Analisis dari pernyataan tersebut bahwa lurah Kabayan sangat mengharapkan masyarakatnya lebih sejahtera dengan digulirkannya Program Raskin tersebut, karena RTS-PM tidak susah lagi membeli beras dengan harga murah dan kebutuhan pangan makan sehari-hari tercukupi.

Menurut P₃ I₄ adalah :

“Gairah hidup masyarakat bertambah, RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa yang mata pencahariannya petani, buruh, dan kuli mendapat kesejahteraan hidup”.
(Wawancara dengan Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa CH. 48 tahun)

Analisa peneliti menurut pernyataan di atas :

Dengan digulirkannya Program Raskin untuk warga Rumah Tangga Miskin yang hanya bermatapencaharian petani, buruh dan kuli, gairah hidup mereka meningkat, karena Raskin tersebut memberikan kesejahteraan kepada RTSPM.

Kemudian Ketua RW 07 Pasir Kalapa menambahkan :

“Bagi RTM yang tidak memiliki kartu, masih bisa mendapat bagian Raskin, yaitu dari hasil musyawarah dengan RTM yang sudah memiliki kartu. Pembayaran Raskin di RW 07 Kp. Pasir Kalapa pembayarannya sudah lunas. Kelurahan memberikan waktu minimal 3 hari untuk melunasi beras Raskin kepada kelurahan. Untuk tahun 2010 beras Raskin kelurahan Kabayan hanya turun sebanyak 5 kali pendistribusian”.

Analisa peneliti mengenai pernyataan di atas adalah :

RW dan RT di Kp. Pasir Kalapa memberikan kebijakan dengan berdasarkan hasil musyawarah dengan RTM yang mempunyai kartu Raskin agar membagi Raskin tersebut dengan Rumah Tangga Miskin yang tidak menerima kartu. Pada tahun 2010 RW 07 Kp. Pasir Kalapa sudah melunasi Raskinnya.

Menurut P₃ I₅ adalah :

“Dengan digulirkannya Program Raskin derajat perubahan yang dicapai yaitu masyarakat lebih sejahtera, karena pengeluaran untuk membeli beras berkurang, masyarakat juga sangat senang karena Raskin ini sangat murah, harganya terjangkau, berbeda dengan beras di pasar yaitu harga berasnya lebih mahal. Kalau turun Raskin masyarakat berebut untuk mendapat Raskin tersebut. Kalau turun Raskin jangka pembayarannya jangan 1 minggu, jumlah beras tolong ditambah, karena masih ada RTSPM yang belum mendapat Raskin yaitu 10 Kepala Keluarga”.

(Wawancara dengan Ibu RW 05 Kp. Cikaung Kelurahan Kabayan En. 40 tahun).

Analisa peneliti berdasarkan pernyataan di atas adalah :

Derajat perubahan yang dicapai dengan digulirkannya Program Raskin tersebut adalah masyarakat lebih sejahtera karena dengan Harga Raskin yang murah dan terjangkau pengeluaran mereka untuk membeli beras berkurang. Oleh karena itu antusias masyarakat terhadap Raskin ini sangat tinggi, sampai mereka berebutan untuk membeli Raskin kepada RT. Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa kuota beras Raskin ini lebih sedikit dari jumlah RTSPM di RW 05 Kp. Cikaung.

Menurut P₃ I₆ adalah :

“Derajat perubahan yang dicapai dengan digulirkannya Program Raskin ini adalah masyarakat kami pengeluaran sehari-harinya berkurang, karena berkurangnya pengeluaran tersebut kami merasa bersyukur”.

(Wawancara dengan SM. 67 tahun, Ketua RW 14 Kp. Mangkubumi Kelurahan Kabayan).

Analisa peneliti berdasarkan pernyataan di atas adalah :

Pernyataan tersebut menurut penulis bahwa dengan digulirkan Program Raskin kepada warga RTM (Rumah Tangga Miskin) masyarakat sangat menerima dan merespon dengan baik, karena Program Raskin tersebut mengurangi Pengeluaran RTM, dan dengan berkurangnya beban Rumah Tangga RTM otomatis mereka bisa menggunakan uang mereka untuk kebutuhan yang lain.

Menurut P₃ I₇ adalah :

“Biasanya sehari-hari beli beras, karena adanya Raskin kita bisa beberapa hari tidak membeli beras, dan kami ingin tiap bulan beras Raskin ini turun”.

(Wawancara dengan DH. 24 tahun, RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa Kel. Kabayan)

Analisa peneliti bahwa RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa tersebut sangat mengharapkan Raskin ini tiap bulan bisa turun, karena dengan adanya Raskin mereka tidak perlu membeli beras tiap hari.

Menurut P₃ I₈ adalah sebagai berikut :

“Dengan diturunkannya Raskin, kesejahteraan RTSPM bertambah, diharapkan Raskin ini turunnya 1 minggu sekali. Beras yang didistribusikan harus beras yang bagus, jangan berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Kepada Bapak Presiden dimohon kualitas Raskin ini ditingkatkan, agar masyarakat miskin kesehatannya terjaga”.

(Wawancara dengan UH. 45 tahun, RTSPM RW 05 Kp. Cikaung Kel. Kabayan).

Analisa peneliti berdasarkan pernyataan di atas adalah :

RTSPM RW 05 Kp. Cikaung mempunyai keinginan yang sama dengan RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa yang mengharapkan Raskin tersebut pendistribusiannya lancar secepat-cepatnya minimal 1 minggu sekali Raskin tersebut bisa didistribusikan kepada masyarakat.

Ibu Uun Husniar juga mengharapkan perhatian dari Pemerintah untuk memberi perhatian kepada kualitas beras miskin yang didistribusikan oleh Bulog. Karena pada tahun 2010 beras Raskin tersebut berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Hal ini harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan warga miskin.

Menurut P₃ I₉, derajat perubahan yang ingin dicapai adalah:

“Jika kesejahteraan, kami merasa kesejahteraan kami tidak meningkat. Karena Raskin tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan selama 2 hari saja. Kalau bisa kami sampaikan agar pendistribusian Raskinnya ditambah”.

(Wawancara dengan RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi Kelurahan Kabayan, EN. 29 tahun).

Analisa peneliti berdasarkan pernyataan di atas adalah :

Pendapat yang dikemukakan oleh RTSPM RW 14 Kp. Pasir Kalapa sangat berbeda dengan pernyataan-pernyataan dari para informan sebelumnya. Beliau berpendapat bahwa Raskin ini hanya bisa dikonsumsi selama 2 hari saja. Selebihnya mereka harus membeli lagi beras di pasar/warung. Karena jatah Raskin yang mereka terima sedikit yaitu 7.5 kg setiap pendistribusiannya. Karena jatah mereka harus dibagi dengan Rumah Tangga Miskin yang tidak mempunyai Kartu Raskin. Ini disebabkan karena kuota Raskin yang diturunkan di

kelurahan Kabayan lebih sedikit dari jumlah RTM nya yang memang banyak. Apalagi pekerjaan masyarakat Kp. Mangkubumi mayoritas petani kecil dan buruh tani.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Keputusan apa yang diambil jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

Menurut P₄ I₁, jika terjadi terlambat pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah :

“Melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat RT, membuat surat teguran kepada lurah Kabayan, evaluasi dan monitoring terhadap realisasi penyetoran Raskin”.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang NR. 45 tahun)

Dari pernyataan tersebut analisa peneliti adalah : Bahwa camat sudah bertindak tegas agar kelurahan Kabayan lebih meningkatkan kinerjanya selaku Pelaksana Distribusi karena lurah adalah penanggung jawab pendistribusian Raskin di wilayah kelurahan Kabayan, selain itu lurah bertanggung jawab dalam penyelesaian pembayaran Harga Pokok Beras (HPB) serta administrasi distribusi Raskin. Jika terjadi kemacetan pembayaran Raskin lurah harus cek ke lapangan dimana pembayaran yang susah dan Camat Pandeglang sudah memerintahkan Lurah Kabayan untuk membicarakan hal ini dengan Forum RW di Kelurahan Kabayan, agar titik permasalahan macetnya pembayaran Raskin bisa ditemukan, dan dihasilkan solusi

yang baik. Jika ada RW yang tidak jujur menyetorkan uang pembayaran Raskin nya agar bisa diganti oleh yang lain.

Sedangkan menurut P₄ I₂, Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah :

“Kita sudah evaluasi di lapangan, penyebab keterlambatan dalam pembayaran Raskin ini memang karena faktor ekonomi RTS-PM kurang, mereka diberi tempo 1 minggu untuk melunasi Raskin ke RT masing-masing tapi dalam jangka 1 minggu itu ada saja yang belum melunasi, ada RW yang mau menanggulangi dulu pembayaran Raskin RTS-PMnya, tapi ada yang tidak bisa juga. Saya juga sudah memanggil RT dan RW di kelurahan Kabayan untuk melaporkan pendistribusian di wilayah RT/RW masing-masing”.

(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES. 42 tahun)

Analisa peneliti dari pernyataan Lurah Kabayan di atas adalah :

Lurah sudah melakukan evaluasi dan monitoring di RT dan RW kelurahan Kabayan, Lurah juga sudah melakukan rapat intern dengan RT dan RW di kelurahan Kabayan. Penyebab keterlambatan ini adalah dari faktor ekonomi masyarakatnya dalam melunasi Raskin di wilayahnya RT/RW ada RW yang mau menanggulangi dulu Raskin untuk RTSPM di wilayah RT/RW nya tapi ada yang tidak bisa menanggulangi, menurut penulis alangkah baiknya jika Raskin untuk RTSPM ini digratiskan oleh pemerintah pusat, agar warga miskin benar-benar dapat menerima bantuan dari pemerintah dan kesejahteraannya dapat terangkat.

e. Pelaksana Program

Siapa saja yang melaksanakan Program Raskin di tingkat Kabupaten Pandeglang sampai dengan tingkat kelurahan Kabayan.

Menurut P₅ I₃, yang melaksanakan Program Raskin di tingkat Kabupaten Pandeglang sampai dengan tingkat Kelurahan Kabayan adalah :

“Untuk tingkat Kabupaten Pelaksanaannya adalah Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang yaitu bagian Administrasi, perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang, Tingkat Kecamatan Pandeglang, Pelaksana Programnya adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Pandeglang melalui Bagian Kesos Kecamatan pandeglang. Sedangkan untuk tingkat kelurahan dikelola oleh Kelurahan Kabayan selaku Pelaksana Pendistribusian Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan di bawah naungan Kasi Kesos kelurahan Kabayan Beras Raskin tersebut diterima dari Satuan Kerja Raskin yang bertanggung jawab kepada Perum Bulog Divisi Regional I Rangkas Bitung”.
(Wawancara dengan Staf Kesos MH. 38 tahun)

Terkait hasil wawancara tergambar bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang seluruh unsur aparatur pemerintah ikut berpartisipasi dan terlibat dari tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahannya sendiri. Program Raskin ini bukan program yang gampang karena banyak melibatkan stakeholder.

Sedangkan menurut P₅ I₂, Pelaksana Program di tingkat kelurahan Kabayan adalah :

“Lurah, Kasi Kesos Kelurahan Kabayan serta RT dan RW sekelurahan Kabayan, karena kelurahan Kabayan merupakan pelaksana distribusi. Jadi Kelurahan Kabayan mempunyai tugas untuk mendistribusikan Raskin sampai ke RTSPM.”
(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES. 42 tahun)

Analisa peneliti dari pernyataan di atas bahwa kelurahan Kabayan selaku pelaksana distribusi di tingkat kelurahan mempunyai wewenang untuk mendistribusikan Raskin kepada RTSPM, dan pembayaran Raskin serta administrasinya merupakan tanggung jawab Lurah sepenuhnya, bilamana terjadi keterlambatan pembayaran Raskin seperti sekarang, seharusnya lurah Kabayan mengadakan rapat intern dan mempertanyakan setoran dari tiap-tiap RT, dari situ akan terlihat RW dan RT mana saja yang belum melunasi pembayarannya.

Sedangkan menurut P₅ I₄, tentang pembayaran Raskin :

“Pendistribusian ke RTSPM Kp. Cikaung lancar, tetapi kalau belum punya uang ditombokin dulu sama Pak RW, kemarin masih Rp. 300.000 yang belum dibayar oleh RTSPM ke Pak RW sampai sekarang masih ada yang belum membayar”
(Wawancara dengan Ibu RW 05 Kp. Cikaung Un. 40 tahun)

Analisa peneliti dari pernyataan di atas adalah kalau yang belum bayar Raskin ditombokin dulu sama Pak RW masing-masing. Kenapa bisa terjadi pembayaran yang macet, kalau di tiap-tiap RW sudah menyetorkan uang pembayaran Raskin lalu mengapa kelurahan Kabayan belum bisa menyelesaikannya tunggakannya.

Menurut P₅ I₂, kelurahan Kabayan sering terlambat dalam melunasi pembayaran Raskin karena :

“RTSPM kelurahan Kabayan tidak lancar dalam membayar Beras Raskinnya, karena faktor ekonomi mereka yang rendah dan dari kalangan menengah ke bawah”
(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES. 42 tahun)

Analisis peneliti dari pernyataan di atas :

Wajar jika RTSPM tidak lancar dalam melakukan pembayaran Raskinnya, karena bagi masyarakat miskin uang sebesar Rp. 20.800 untuk membayar beras Raskin sebanyak 13 kg pun kalau belum ada mereka bingung harus membayar dengan apa. Sementara mereka membutuhkan beras Raskin tersebut. Di sebagian kelurahan masih ada Ketua RW yang mau menanggulangi pembayaran Raskin untuk RTSPM diwilayahnya tapi di sebagian RW lagi belum bisa. Ketua RW yang sering menanggulangi dulu pembayaran Raskin untuk RTSPMnya adalah Ketua RW 05 Kp. Cikaung.

Menurut P₅ I₁, penyebab terlambatnya penyetoran yaitu :

“Sistim kolektif yang belum maksimal, pembentukan Tim yang belum berkompeten, belum bekerja sesuai harapan, kesadaran RTSPM untuk membayar Raskin masih rendah, BOP Raskin belum maksimal, masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah”.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang NR. 45 tahun)

Selanjutnya P₅ I₁, menambahkan :

“Sebenarnya Bulog tidak ada masalah, pendistribusian dari Bulog lancar, tetapi pembayaran dari kelurahan kabayan yang terlambat. Jika pembayaran pendistribusian bulan lalu belum dilunasi oleh Kelurahan Kabayan, maka Bulog tidak dapat mengirimkan dulu beras Raskin tersebut sampai pembayaran Raskinnya dilunasi”.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang, NR. 45 tahun)

Dari kedua pernyataan di atas, analisis peneliti adalah :

Penyebab ketelambatan pembayaran Raskin di kelurahan Kabayan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berasal dari aparaturnya sendiri, aparaturnya Kelurahan

Kabayan kurang semangat dalam bekerja menyalurkan Raskin di wilayahnya, karena Biaya Operasional (BOP) Raskin sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 6 (enam rupiah) per kilogram, sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi dan teknis di lapangan masih rendahnya ekonomi RTSPM.

f. Sumberdaya yang digunakan

Menurut P₆ I₁, sumber daya aparatur Kelurahan Kabayan :

“Sumber daya aparatur Kelurahan Kabayan belum optimal yaitu belum menguasai pekerjaannya”
(Wawancara dengan Camat Pandeglag, NR. 45 tahun)

Analisis peneliti dari pernyataan di atas adalah :

Sumberdaya aparatur pemerintah sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan. Aparatur kelurahan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Program Pemerintah/Raskin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini. Sebagai pelaksana distribusi kelurahan harus memilih aparatur-aparatur yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, karena implementasi Raskin ini adalah merupakan Program dari Pemerintah Pusat untuk warga miskin yang membutuhkan beras bersubsidi.

Menurut P₆ I₂, :

“Sumberdaya aparatur kelurahan Kabayan cukup baik, hanya masyarakatnya yang belum mampu, karena kami tidak menargetkan jumlah, tapi kami lebih menitik beratkan pada sasaran. Berapa sasaran RTS-PM yang sudah menerima Raskin, karena kami ingin tepat sasaran, Raskin ini benar-benar hanya dibeli oleh RTSPM, bukan kepada pihak lain yang ingin mengambil keuntungan”.
(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES 42 tahun)

Analisis peneliti dari pernyataan di atas adalah :

Kelurahan Kabayan bertujuan baik, ingin benar-benar memberikan Raskinnya hanya untuk RTSPM yang benar-benar membutuhkan. Tetapi segi pembayaran juga harus diupayakan lancar, karena jika pembayaran sering terlambat, maka pendistribusian Raskinnya terlambat juga, pihak Sub Dolog Sub Divre I tidak bisa mengirimkan Raskin ke Kelurahan Kabayan sebelum pembayarannya dilunasi. Jika Raskin di Kelurahan Kabayan sering telat Pendistribusiannya maka yang dirugikan adalah warga miskin di kelurahan Kabayan sendiri. Karena peneliti adalah Staf Kecamatan Pandeglang, mendapat pertanyaan sebagai berikut.

Menurut P₅ I₅, mengenai keterlambatan Raskin :

“Kenapa sekarang-sekarang ini raskin belum turun ya bu? Warga di RW saya sudah sering menanyakan kapan Raskin turunnya.”

(Wawancara dengan Ibu RW 06 Kp. Cikaung, Un. 40 tahun)

Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa masyarakat sangat mengharapkan Raskin cepat didistribusikan kembali, pihak kelurahan seharusnya segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

2. Lingkungan Kebijakan (*Contex of Policy*)

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Menurut P₇ I₁, apa yang dilakukan oleh *stakeholder* kecamatan untuk mensukseskan program Raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010.

“Lebih meningkatkan pengawasan, dengan evaluasi dan monitoring”

(Wawancara dengan Camat Pandeglang NR. 45 tahun)

Analisis dari peneliti adalah :

Pengawasan sangat baik dilakukan dalam implemementasi suatu kebijakan, sebuah kebijakan jika tidak diawasi akan menghasilkan program yang gagal. Jika program sudah berjalan, maka program tersebut harus dievaluasi, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut substansi dan implementasi dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijaksanaan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut P₈ I₁, strategi apa yang dilakukan oleh Camat Pandeglang agar kelurahan Kabayan dapat mengatasi keterlamabatan pembayaran

Raskinnya, agar pendistribusian Raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang lancar.

“Menerapkan kebijakan dan peraturan yang sudah ada, contohnya RTSPM harus membayar Raskinnya dalam jangka 5 hari, mengikuti undang-undang yang sudah ada, ada batasan limit waktu pembiayaan, adanya sanksi kepada kelurahan yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat”.

(Wawancara dengan Camat Pandeglang NR. 45 tahun)

Analisis dari pernyataan di atas adalah :

Jika strategi ini benar-benar diterapkan kelurahan Kabayan sebagai pelaksana distribusi Raskin di Wilayah Kelurahan Kabayan bisa memperbaiki kebijakan yang diterapkannya, dan bisa lebih tegas kepada aparat kelurahan sampai dengan ke tingkat RT. Kelurahan Kabayan diharapkan dapat memperbaiki implementasi Raskin di lapangan.

Menurut P₉ I₂, strategi yang dilakukan kelurahan Kabayan agar pembayaran Raskin di wilayahnya lancar.

“Memberi tugas kepada Staf yang dipercaya, yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk memegang uang Raskin, membuka dialog dengan RT/RW tentang permasalahan-permasalahan Raskin yang ditemukan di lapangan”.

(Wawancara dengan Lurah Kabayan, ES. 42 tahun)

Analisa peneliti yaitu :

Alangkah baiknya jika yang menyimpan, dan memegang uang Raskin adalah orang yang jujur, amanah dan bisa dipercaya. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kelurahan dan RTSPM khususnya. Dialog dengan RT/RW dan masyarakat di lingkungan kelurahan Kabayan bisa membuka jalan untuk mengetahui

permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemukan dilapangan dalam implementasi Beras Miskin di wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Menurut P₁₀ I₁, bagaimana karakteristik kelurahan Kabayan sehingga pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan terlambat.

“Aparatur kelurahan masih lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah/Raskin.”
(Wawancara dengan Camat Pandeglang, NR. 45 tahun)

Sedangkan menurut P₁₁ I₁, tentang karakteristik masyarakat Kelurahan Kabayan adalah :

“Antusias masyarakat terhadap Raskin yang digulirkan Pemerintah di Kelurahan Kabayan cukup bagus”
(Wawancara dengan Camat Pandeglang NR. 45 tahun)

Analisis peneliti dari pernyataan tersebut diatas adalah :

Sebagai pengambil keputusan, seorang pimpinan harus tegas dalam mengambil keputusan, mengontrol setiap program yang sedang berjalan dan tegas menerapkan peraturan kepada aparatur di lingkungan kerjanya.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Menurut P₁₂ I₂, bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur kelurahan Kabayan dalam pelaksanaan program Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010, serta faktor pendukung dan penghambat program

Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010.

“Tingkat kepatuhan dan Respon pelaksana cukup baik, hanya masih terdapatnya ekonomi masyarakat RTSPM kelurahan Kabayan yang kurang memadai”.

(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES. 42 tahun)

Analisis peneliti :

Jika dianalisa jawaban dari Lurah Kabayan tersebut menjelaskan bahwa penyebab keterlambatan pembayaran Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakatnya yang kekurangan, dan aparat kelurahan Kabayannya sudah bekerja dengan optimal, meskipun BOP untuk Raskin ini kecil hanya Rp. 6,- per kilogram.

Menurut P₁₃ I₂, mengenai Faktor Pendukung Implementasi Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah :

“Keinginan RTS-PM untuk mendapatkan Raskin sangat tinggi, wilayah kelurahan Kabayan strategis bisa masuk kendaraan dan sarana jalan sudah baik”.

(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES. 42 tahun)

Analisa peneliti adalah :

Lokasi kelurahan Kabayan cukup mendukung, jika Raskin diminati masyarakat Kelurahan Kabayan diharapkan juga dalam pembayaran Raskinnya, karena jika implementasi Program Raskin di kelurahan Kabayan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, sudah dipastikan Program Raskin tersebut tidak berhasil.

Menurut P_{14 I₂}, mengenai faktor penghambat implemntasi Raskin di Wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah :

“Masih ditemukan beras dengan kualitas rendah, kesadaran masyarakat untuk membayar masih ada yang kurang, factor ekonomi yang lemah, RTSPM berasal dari kalangan menengah ke bawah”.

(Wawancara dengan Lurah Kabayan ES. 42 tahun)

Analisa peneliti :

Dari pernyataan di atas adalah kualitas beras yang diterima RTSPM mempengaruhi pembayaran dari RTSPM, karena kualitas beras yang rendah RTSPM menjadi malas membayar. Perum Bulog agar lebih meningkatkan kualitas beras Raskin yang dijual kepada RTSPM ini. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan RTSPM RW 05 Kp. Cikaung mereka sering menerima beras Raskin dengan kualitas yang rendah, berikut hasil wawancaranya :

P_{14 I₄} menyatakan bahwa :

“Beras yang didistribusikan harus beras yang bagus jangan yang berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Kepada Bapa Presiden dimohon untuk memberi perhatian kepada kualitas beras miskin yang didistribusikan oleh Bulog, karena pada tahun 2010 Raskin tersebut berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Hal ini harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan warga miskin”.

(Wawancara dengan, RTSPM RW 05 Kp. Cikaung, UH. 45 tahun)

Dari pernyataan di atas analisis peneliti adalah :

Masyarakat RTSPM sangat menghargakan kualitas Raskin diperbaiki karena yang selama ini terjadi mereka sering menerima Raskin dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi. Perum Bulog harus mementingkan kesejahteraan masyarakat juga, tidak hanya mementingkan keuntungan perusahaannya.

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Yang mana hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi Raskin di kelurahan Kabayan seperti Camat Pandeglang, Lurah Kabayan, Staf Kesos Kecamatan, Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa, Ibu RW 05 Cikaung dan Ketua RW 14 Mangkubumi, RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa, RTSPM RW 05 Kp. Cikaung, RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi dan keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 Tepat (6T) yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi maka kesimpulan penulis adalah bahwa Implementasi Raskin tersebut belum sesuai dengan tujuan, implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang belum dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan dari tujuan kebijakan tersebut.

Dari hasil akhir penelitian tersebut kita dapat melihat kembali teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam Agustino (2006:154) yang menyatakan bahwa :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individu *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Dari teori yang dikemukakan oleh Grindle tersebut peneliti dapat menjelaskan mengenai implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun

2010, dimana dalam teori tersebut indikator yang terpenting dalam melihat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut adalah dengan melihat bagaimana proses implementasi tersebut, begitu juga dalam Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 harus melihat bagaimana proses implementasi tersebut, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan program/aturan yang telah ditentukan.

Selain itu Grindle juga dalam Agustino (2006:168) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan amat ditentukan oleh tingkat implementasi itu sendiri, yang terdiri dari *content of policy* (Isi Kebijakan) dan *Context of Policy* (lingkungan kebijakan).

Berdasarkan analisis mengenai implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang di atas, menurut Analisis peneliti bahwa implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan proses pelaksanaan program telah sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui menteri perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dan dituangkan dalam Buku Petunjuk Teknis atau Buku Pedoman Raskin yang telah dipaparkan oleh penulis. Secara teknis proses pelaksanaan, pendistribusian Raskin di Kelurahan Kabayan sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan namun pelaksanaan pembayararan RTSPM-nya mengalami keterlambatan pembayaran, hambatannya yaitu dari faktor ekonomi RTSPM yang rendah.

Implementasi Program raskin di kelurahan Kabayan diukur oleh Tingkat Implementasi *Content of Policy* yaitu isi kebijakan dan *context of policy* yaitu

lingkungan kebijakan. Untuk isi kebijakan sendiri yang terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang dicapai menurut peneliti sudah sesuai, dan dapat dijadikan pendukung dalam suatu kebijakan untuk diimplementasikan, hanya saja untuk indikator letak pengambilan keputusan, sumber daya yang digunakan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana menurut penulis belum cukup mendukung terhadap implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian Implementasi Program raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang yaitu Camat Pandeglang Hj. Nuriah, M.Si., Kabupaten Pandeglang tahun 2010 unsur kepentingan dalam implementasi ini adalah melalui isu strategis pengentasan kemiskinan. Secara politikalnya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pandeglang, tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Indikator tipe manfaat sudah sesuai dan dapat dijadikan pendukung dalam implementasi karena program Raskin ini sangat dirasakan manfaatnya oleh RTSPM di Kelurahan Kabayan dengan digulirkannya Program raskin ini ada perubahan yang dirasakan oleh Rumah Tangga Miskin, yaitu kesejahteraan mereka terbantu, sedangkan untuk indikator yang lain hanya RTSPM RW 14 Mangkubumi yang belum merasakan kesejahteraan dari Program Raskin tersebut, berdasarkan wawancara dengan Camat Pandeglang yaitu letak pengambilan keputusan Kelurahan Kabayan dinilai masih lemah dalam mengambil keputusan. Begitu juga mengenai sumber daya yang digunakan, aparatur

Kelurahan Kabayan tidak taat peraturan dalam menjalankan tugasnya selaku Pelaksana Distribusi Raskin, Kelurahan Kabayan belum mengupayakan strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembayaran dari RTSPM-nya, untuk indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa kelurahan Kabayan masih lemah dalam menegakan fungsi kontrol terhadap Pelaksanaan Program Pemerintah, tidak tegas dan lemah dalam menerapkan aturan kepada aparatur dikelurahan Kabayan sampai ke tingkat RT. Dan untuk indikator tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksanaan menurut wawancara dengan lurahnya cukup baik.

Menurut analisa peneliti apa yang dikemukakan oleh Grindle memang benar, bahwa keberhasilan implementasi tersebut amat ditentukan oleh tingkat implementasinya. Baik dari isi kebijakan maupun dari lingkungan kebijakan itu sendiri. Dimana baik isi maupun dari lingkungan kebijakan tersebut harus menjadi pendukung dari sebuah implementasi kebijakan dalam upaya untuk tercapainya tujuan yang diharapkan dari kebijakan itu sendiri. Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 pada dasarnya baik isi maupun dari lingkungan kebijakan itu sendiri beberapa indikator sudah cukup mendukung tapi ada beberapa indikator yang belum mendukung, sehingga beberapa indikator yang kurang mendukung tersebut menjadi penghambat bagi kelancaran implementasi tersebut. Dimana implementasi program raskin di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 belum berjalan seperti yang diharapkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, karena pendistribusian Raskin di Kelurahan Kabayan tahun 2010 terlambat. Hal ini disebabkan karena pembayaran Beras Miskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) kepada Pihak Kelurahan Kabayan tersendat.
2. Faktor pendukung Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah :
 - a. Partisipasi masyarakat RTS-PM untuk mengambil Beras Miskin cukup tinggi.
 - b. Wilayah demografi Kelurahan Kabayan mendukung, lokasi strategis dekat dengan Kantor Kecamatan Pandeglang yaitu 0,2 KM dan dekat dengan pusat Pemerintah Setda Kabupaten Pandeglang hanya 0,5 KM, lokasi RTS-PM tinggal sudah terjangkau kendaraan, sumber daya cukup memadai, jarak antara Kelurahan Kabayan dengan Dolog Divisi Regional I Rangkas Bitung tidak begitu jauh yaitu \pm 10 KM.
3. Faktor yang menghambat Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi Masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang masih rendah, dan RTS-PM tersebut berasal dari kalangan bawah.
- b. Sistem kolektif yang belum maksimal.
- c. Pembentukan tim yang belum berkompeten belum bekerja sesuai harapan.
- d. Ada sebagian dari RTS-PM yang kesadaran untuk membayar Raskin nya masih rendah.
- e. Biaya operasional Raskin belum maksimal dan masih ditemukannya beras Raskin dengan kualitas rendah.
- f. Sumber daya aparatur di Kelurahan Kabayan belum maksimal.
- g. Fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Program Raskin masih lemah.
- h. Menegakan aturan kepada Aparatur di Kelurahan Kabayan sampai ke tingkat RT tidak tegas.
- i. Masih ditemukannya Beras Miskin (Raskin) dengan kualitas rendah, beras Raskin tersebut berbau apek, berkutu dan berwarna kuning.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada aparaturnya Kelurahan Kabayan dapat memperbaiki kinerja mengenai Implementasi Program Beras Miskin di Wilayah Kerjanya, agar permasalahan-permasalahan dalam Program Raskin tersebut dapat segera diselesaikan sehingga RTS-PM Kelurahan Kabayan dapat menerima Beras Miskin Rutin setiap bulan.
2. a. Karena permasalahannya dari faktor ekonomi masyarakat RTS-PM Kelurahan Kabayan alangkah baiknya jika segera dikoordinasikan bersama Tim Koordinator Pelaksana Kecamatan Pandeglang dan Tim Koordinator Pelaksana Kabupaten yaitu Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pandeglang, agar dapat dihasilkan keputusan yang baik untuk semua pihak, dan tidak akan menimbulkan pemikiran yang negatif sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Segera ditunjuk aparaturnya di Kelurahan Kabayan untuk mengkoordinir Pembayaran Raskin di tiap-tiap RW, jika Raskin sudah turun dan aparaturnya tersebut harus melaporkan dan menyetorkan langsung uang pembayaran Raskin dari RTS-PM pada hari itu juga kepada Bagian Kesos Kelurahan Kabayan, untuk menghindari hal-hal yang negative. Hal ini untuk memudahkan pengawasan.
- c. Segera dilaksanakan musyawarah dengan Forum RW, agar dapat diketahui di RW mana yang pembayaran Raskin nya belum lunas.

- d. Untuk RTS-PM yang sering menunggak pembayaran Raskin karena kesengajaan, bisa diganti oleh RTS-PM yang tidak memiliki Kartu Raskin tapi dia sangat bertanggung jawab kepada kewajibannya.
- e. Untuk BOP (Biaya Operasional Raskin) dapat dimusyawarahkan dalam rapat bersama Tim Koordinasi Pelaksana Program Raskin tingkat Kabupaten Pandeglang yaitu bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pandeglang, agar BOP tersebut diusulkan untuk dinaikan sesuai dengan anggaran yang ada di Kabupaten Pandeglang.
- f. Untuk meningkatkan sumber daya aparatur di Kelurahan Kabayan hendaknya dilaksanakan kegiatan pelatihan tentang pelaksanaan Raskin ini agar pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai Raskin tersebut dapat diserap dan dilaksanakan oleh aparatur di kelurahan Kabayan.
- g. Pihak Kecamatan Pandeglang dan pihak Kelurahan Kabayan harus benar-benar melaksanakan fungsi kontrol terhadap Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kecamatan Pandeglang khususnya Kelurahan Kabayan
- h. Peraturan dalam Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang harus dijalankan dengan benar oleh aparatur kelurahan Kabayan. Bagi yang melanggar peraturan dan melakukan perbuatan penyelewengan agar ditindak tegas sesuai peraturan kepegawaian. Agar menjaga cermin ke depan dan bagi

yang lain untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan melanggar aturan dan hukum.

- i. Jika Raskin yang didistribusikan oleh Perum Bulog adalah beras yang tidak layak, bisa dikirimkan kembali kepada pihak Bulog untuk diganti dengan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh RTS-PM ini sesuai dengan peraturan dari Menko Kesra yang dituangkan dalam Buku Petunjuk dan Teknis Raskin tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 32 tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1996* Tentang Pangan.
- Undang-Undang No. 47 tahun 2009*. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Presiden RI No. 13 tahun 2009*. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Intruksi Presiden No. 8 tahun 2008*. Tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002*. Tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003*. Tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
- Keputusan Menko Kesra No. 35 tahun 2008*. Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- Buku Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010* dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Kabayan* Tahun 2010
- Buku Monografi Kelurahan Kabayan* Tahun 2010.
- Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung : Aldi Bandung – Pusat KPEW Lemit UNPAD.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Endi, Haryono dan Sapto, Ilkodar. 2005. *Menulis Skripsi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanafiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Grapindo Persada.

- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta : PPM
- Strauss, Anselm dan Corbin Juliet. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2005. Analisis *Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Rt. Nina Maryana, Lahir di Jakarta 14 Juli 1980, anak Kedua dari 7 bersaudara dari Ayah yang bernama Tubagus Sahrul Diat dan Ibu yang bernama Maryamah,

Tamat Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Cilaja III di Kabupaten Pandeglang tahun 1992, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri V Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 1998, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2001, dan sejak tahun 2006 Menempuh Pendidikan Sarjana Strata (S1) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**MATRIK HASIL WAWANCARA
SETELAH REDUKSI DATA**

1. Isi Kebijakan (Content of Pollicy)

I	P	Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang?
	I ₁	Secara politikal mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pandeglang yaitu tentang kesejahteraan rakyat, dengan digulirkannya program-program pemerintah, untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Program Beras Miskin, agar kesejahteraan warga miskin dapat terangkat. Impelementasi Program Raskin yang dikerja bukan kepentingan, karena jika ditelaah kepentingan disini secara politik. Jika yang dikejar kepentingan aka nada kesenjangan-kesenjangan antara tujuan Program Raskin daengan Stake Holder di pemerintah
I	P	Manfaat apa yang dirasakan oleh warga miskin kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan digulirkannya program raskin oleh Pemerintah Pusat
	I ₁	Manfaat yang dirasakan oleh warga miskin kelurahan Kabayan Kecamatan pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan digulirkannya Program raskin, kesejahteraan warga miskin dapat terangkat.
	I ₃	Raskin adalah salah satu Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan Rawan Pangan agar mereka mendapatkan beras murah untuk kebutuhan mereka sehari-hari
I		Manfaat apa yang dirasakan oleh warga miskin Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan digulirkannya Program Raskin oleh Pemerintah Pusat.
	I ₁	Dengan digulirkannya Program raskin, kesejahteraan warga miskin dapat terangkat.
	I ₃	Raskin adalah salah satu Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan Rawan Pangan agar mereka mendapatkan beras murah untuk kebutuhan mereka sehari-hari
	I ₄	Warga RW 07 Kp. Pasir Kalapa sangat berterimakasih karena merasa terbantu, dan mengurangi beban mereka meskipun mendapat jatah Raskinnya 1 bulan sekali, karena pencaharian masyarakat di RW 07 Pasir Kalapa kebanyakan petani, dan jika gagal panen mereka tidak dapat memiliki penghasilan dan yang mendapat Raskin tersebut adalah orang lanjut usia yang sudah tidak dapat bekerja.
	I ₅	Membantu keluarga miskin untuk mendapat beras untuk kebutuhan sehari-hari

I ₅	Pendistribusian dari Bulog lancar tetapi suka ditombokin oleh RW, kemarin waktu didistribusikan yang terakhir ditombokin oleh RW yaitu sebesar Rp. 300.000 dan sampai sekarang masih ada RTSPM yang belum membayar kepada saya. Tetapi ke kelurahan mah sudah dilunasi. Karena jatah dari Kelurahan untuk penyeteran Raskin ke kelurahan minimal 3 hari setelah didistribusikan dan maksimal 1 minggu
I ₆	Kami masyarakat di RW 14 Mangkubumi merasa bersyukur dengan diturunkan Program Raskin ini, kami juga merasa berterima kasih karena kami merasa terbantu dan pengeluaran sehari-hari dapat berkurang
P 1	Dengan digulirkannya Program raskin ke daerah-daerah derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah?
I ₁	Drajat perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah agar beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) berkurang, tujuannya meningkatkan akses masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, dan melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.
I ₂	Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh masyarakat khususnya di kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah masyarakat lebih sejahtera, dan mereka tidak susah lagi membeli beras. Saya ingin masyarakat di kelurahan Kabayan ini dapat membayar jatah Raskin mereka, agar mereka punya beras untuk makan sehari-hari.
I ₄	Gairah hidup masyarakat bertambah, RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa yang mata pencahariannya petani, buruh, dan kuli mendapat kesejahteraan hidup
I ₄	Bagi RTM yang tidak memiliki kartu, masih bias mendapat bagian Raskin, yaitu dari hasil musyawarah dengan RTM yang sudah memiliki kartu. Pembayaran Raskin di RW 07 Kp. Pasir Kalapa pembayarannya sudah lunas. Kelurahan memberkan waktu minimal 3 hari untuk melunasi beras Raskin kepada kelurahan. Untuk tahun 2010 beras Raskin kelurahan Kabayan turun sebanyak 5 kali pendistribusian
I ₅	Dengan digulirkannya Program Raskin derajat perubahan yang dicapai yaitu masyarakat lebih sejahtera, karena pengeluaran untuk membeli beras berkurang, masyarakat juga sangat senang karena Raskin ini sangat murah, harganya terjangkau, berbeda dengan beras di pasar yaitu harga berasnya lebih mahal. Kalau turun Raskin masyarakat berebut untuk mendapat Raskin tersebut. Kalau turun Raskin jangka pembayarannya jangan 1 minggu, jumlah beras tolong ditambah, karena masih ada RTSPM yang belum mendapat Raskin yaitu 10 Kepala Keluarga
I ₆	Derajat perubahan yang dicapai dengan digulirkannya Program Raskin ini adalah masyarakat kami pengeluaran sehari-harinya berkurang, karena berkurangnya pengeluaran tersebut kami merasa bersyukur
I ₇	Biasanya sehari-hari beli beras, karena adanya Raskin kita bias beberapa hari tidak membeli beras, dan kami ingin tiap bulan beras Raskin ini turun

P I	Keputusan apa yang akan diambil jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang?
I ₁	Melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat RT, membuat surat teguran kepada lurah Kabayan, evaluasi dan monitoring terhadap realisasi penyetoran Raskin
I ₂	Kita sudah evaluasi di lapangan, penyebab keterlambatan dalam pembayaran Raskin ini memang karena factor ekonomi RTS-PM kurang, mereka diberi tempo 1 minggu untuk melunasi RAskin ke RT masing-masing tapi dalam jangka 1 minggu itu ada saja yang belum melunasi, ada RW yang mau menanggulangi dulu pembayaran Raskin RTS-PMnya, tapi ada yang tidak bisa juga. Saya juga sudah memanggil RT dan RW di kelurahan Kabayan untuk melaporkan pendistribusian di wilayah RT/RW masing-masing
P I	Siapa saja yang melaksanakan Program raskin di Tingkat Kabupaten Pandeglang?
I ₃	Untuk tingkat Kabupaten Pelaksanaannya adalah Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pandeglang yaitu bagian Administrasi, perekonomian Setda Kabupaten Pandeglang, Tingkat Kecamatan Pandeglang, Pelaksana Programnya adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Pandeglang melalui Bagian Kesos Kecamatan padneglang. Sedangkan untuk tingkat kelunasan dikelola oleh Kelurahan Kabayan selaku Pelaksana Pendistribusian Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan di bawah naungan Kasi Kesos kelurahan Kabayan Beras Raskin tersebut diterima dari Satker Raskin yang bertanggung jawab kepada Perum Bulog Devisi Regional I Rangkas Bitung
I ₂	Lurah, Kasi Kesos Kelurahan Kabayan serta RT dan RW sekelurahan Kabayan, karena kelurahan Kabayan merupakan pelaksana distribusi. Jadi Kelurahan Kabayan mempunyai tugas untuk mendistribusikan Raskin sampai ke RTSPM.
I ₅	Pedistribusian ke RTSPM Kp. Cikaung lancar, tetapi suka ditalangin dulu sama Pak RW Rp. 300.000 yang mau, kalau belum punya uang ditombokin dulu sama Pak RW, kemarin masih Rp. 300.000 yang belum dibayar oleh RTSPM ke Pak RW sampai sekarang masih ada yang belum membayar
I ₁	Sistim kolektif yang belum maksimal, pembentukan Tim yang belum berkompeten, belum bekerja sesuai harapan, kesadaran RTSPM untuk membayar Raskin masih rendah, BOP Raskin belum maksimal, masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah
I ₁	Sebenarnya Bulog tidak ada masalah, pendistribusian dari Bulog lancar, tetapi pembayaran dari kelurahan kabayan yang terlambat. Jika pembayaran pendistribusian bulan lalu belum dilunasi oleh Kelurahan Kabayan, maka Bulog tidak dapat mengirimkan dulu beras Raskin tersebut sampai pembayaran Raskinnya dilunasi

I ₂	RTSPM kelurahan Kabayan tidak lancar dalam membayar Beras Raskinnya, karena faktor ekonomi mereka yang rendah dan dari kalangan menengah ke bawah
I ₄	Sebenarnya Bulog tidak ada masalah, pendistribusian dari Bulog lancar, tetapi pembayaran dari kelurahan kabayan yang terlambat. Jika pembayaran pendistribusian bulan lalu belum dilunasi oleh Kelurahan Kabayan, maka Bulog tidak dapat mengirimkan dulu beras Raskin tersebut sampai pembayaran Raskinnya dilunasi
P I	Bagaimana sumber daya Kelurahan Kabayan ?
I ₁	Sumber daya aparatur Kelurahan Kabayan masih rendah
I ₂	Sumberdaya aparatur kelurahan Kabayan cukup baik, hanya masyarakatnya yang belum mampu, karena kami tidak menargetkan jumlah, tapi kami lebih menitik beratkan pada sasaran. Berapa sasaran RTS-PM yang sudah menerima Raskin, karena kami ingin tepat sasaran, Raskin ini benar-benar hanya dibeli oleh RTSPM, bukan kepada pihak lain yang ingin mengambil keuntungan
I ₅	Kenapa sekarang-sekarang ini raskin belum turun ya bu? Warga di RW saya sudah sering menanyakan kapan Raskin turunnya.

2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

I	P	Apa yang dilakukan oleh Para Stakeholder untuk mensukseskan Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang
I	P	Strategi apa yang dilakukan oleh Camat Pandeglang agar Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang lancar dan tidak sering terlambat.
I	P	Strategi apa yang akan dilakukan agar pembayaran Raskinnya tidak ada hambatan
I ₁		Lebih meningkatkan pengawasan, dengan evaluasi dan monitoring
I ₁		Menerapkan kebijakan dan peraturan yang sudah ada, contohnya RTSPM harus membayar Raskinnya dalam jangka 5 hari, mengikuti undang-undang yang sudah ada, ada batasan limit waktu pembiayaan, adanya sanksi kepada kelurahan yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat
I ₂		Menunjuk Staf yang dipercaya, yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk memegang uang Raskin, membuka dialog dengan RT/RW tentang permasalahan-permasalahan Raskin yang ditemukan di lapangan
I	P	Bagaimana karakteristik Kelurahan Kabayan sehingga pembayaran Raskin di Kelurahan ini sering terlambat? Dan bagaimana karakteristik dari lurah Kabayan serta aparatur di Kelurahan Kabayan?
I ₁		Aparatur kelurahan masih lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah/Raskin
I ₁		Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kabayan cukup bagus
I	P	Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur Kelurahan Kabayan dalam pelaksanaan Program raskin di Wilayah Kelurahan Kabayan Kecamatan pandeglang Kabupaten pandeglang pada tahun 2010, serta faktor pendukung dan penghambat Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan pandeglang tahun 2010?
I ₂		Tingkat kepatuhan dan Respon pelaksana cukup baik, hanya masih terdapatnya ekonomi masyarakat RTSPM kelurahan Kabayan yang kurang memadai
I ₂		Partisipasi masyarakat cukup tinggi wilayah demografi kelurahan sangat mendukung, sudah terjangkau kendaraan, sumber daya manusia cukup memadai

I ₂	Masih ditemukan beras dengan kualitas rendah, kesadaran masyarakat untuk membayar masih ada yang kurang, faktor ekonomi yang lemah, RTSPM berasal dari kalangan menengah ke bawah
I ₄	Beras yang didistribusikan harus beras yang bagus jangan yang berbau apek, berketu dan berwarna kuning. Kepada Bapak Presiden dimohon untuk memberi perhatian kepada kualitas beras miskin yang didistribusikan oleh Bulog, karena pada tahun 2010 Raskin tersebut berbau apek, berketu dan berwarna kuning. Hal ini harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan warga miskin

CATATAN LAPANGAN

No	Tanggal	Waktu	Tempat	Hasil	Informan
1	2	3	4	5	6
1	30 Maret 2010	09.00 WIB	Kel. Kabayan	Observasi Awal	-
2	5 April 2010	09.00 WIB	Kel. Kabayan	Wawancara	Lurah Kabayan Bpk. Eman Santosa, SH
3	15 April 2010	13.00 WIB	Kel. Kabayan	Mencari data Raskin RTSPM Kel. Kabayan	Lurah Kabayan Bpk. Eman Santosa, SH
4	3 Mei 2010	09.00 WIB	Kec. Pandeglang	Mencari data Raskin RTS PM Kel. Kabayan	Staf Kesos Kec. Pandeglang Bpk. Moh. Hilala Rayendra
5	4 Juni 2010	09.00 WIB	Kec. Pandeglang	Meminjam Buku Juknis Raskin Tahun 2010 dari Menko Kesra RI	Staf Kesos Kec. Pandeglang Bpk. Moh. Hilala Rayendra
6	12 Juli 2010	09.00 WIB	Kel. Kabayan	Meminjam Buku Monograf Kel. Kabayan	Lurah Kabayan Bpk. Eman Santosa, SH
7	23 Agustus 2010	10.00 WIB	Kec. Pandeglang	Wawancara	Staf Kesos Kec. Pandeglang Bpk. Moh. Hilala Rayendra
8	18 Oktober 2010	09.00 WIB	Kel. Kabayan	Mendata ruang Lingkup Kantor Kel. Kabayan	Lurah Kabayan Bpk. Eman Santosa, SH
9	4 Maret 2011	15.30 WIB	Ruangan Camat Pandeglang	Wawancara	Camat Pandeglang Ibu. Hj. Nuriah, M.Si.
10	7 Maret 2011	09.00 WIB	Ruangan Lurah Kabayan	Wawancara	Lurah Kabayan Bpk. Eman Santosa, SH
11	7 Maret 2011	14.00 WIB	Kantor Kec. Pandeglang	Wawancara	Staf Kesos Kec. Pandeglang Bpk. Moh. Hilala Rayendra
12	8 Maret 2011	09.00 WIB	Rumah Ket. RW 07 Kp. Pasir Kalapa	Wawancara	Ketua RW 07 Kp. Pasir Kalapa Bpk. Cece Husaeni

1	2	3	4	5	6
13	8 Maret 2011	14.00 WIB	Rumah RTSPM RW 07 Kp. Cikaung	Wawancara	RTSPM RW 07 Kp. Pasir Kalapa Ibu Dedeh Nurhasanah
14	9 Maret 2011	09.00 WIB	Rumah Ket, RW 05 Kp. Cikaung	Wawancara	Ibu RW 05 Kp. Cikaung Ibu Unaenah
15	9 Maret 2011	14.00 WIB	Rumah RTSPM RW 05 Kp. Cikaung	Wawancara	RTSPM RW 05 Kp. Cikaung Ibu Uun Husniar
16	10 Maret 2011	09.00 WIB	Rumah Ket, RW 14 Kp. Mangkubumi	Wawancara	Ketua RW 14 Kp. Mangkubumi Bpk. Sudarma
17	10 Maret 2011	14.00 WIB	Rumah RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi	Wawancara	RTSPM RW 14 Kp. Mangkubumi Ibu Enah